



**ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DAN FAKTOR
DETERMINAN PENERAPAN KEMITRAAN USAHA
TANI TEBU RAKYAT**

Studi Kasus: Mitra Tani PG Pandji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo

SKRIPSI

Oleh

**LUKMAN HAKIM
NIM 120810101174**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DAN FAKTOR
DETERMINAN PENERAPAN KEMITRAAN USAHA
TANI TEBU RAKYAT**

Studi Kasus: Mitra Tani PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh

**LUKMAN HAKIM
NIM 120810101174**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, dan Salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Drs., Ec., H. Herman, M.Si. dan Ibunda Hj. Nanik Sofiyati tercinta yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, serta pengorbanan yang tulus dan begitu besar selama ini;
2. Saudaraku Alif Juliyan Nurrahman, S.ST., Qonita Karimah Herfiyah tercinta yang telah memberikan semangat, doa, dan pengorbanan dengan penuh kesabaran;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(terjemahan Surat *Al-Baqarrah* ayat 153)

Orang yang berilmu adalah orang yang menginfakkan hartanya karena ilmu yang dimilikinya. Orang yang berilmu bukan orang yang mencari harta dengan ilmunya
(Syaikh Abu Thalib Al-Makki)

Kebahagiaan seorang mukmin akan nampak di wajahnya, dan kesedihannya ada didalam hatinya
(Recep Tayyip Erdogan)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Hakim

NIM : 120810101174

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Biaya Transaksi Ekonomi Dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juni 2016

Yang menyatakan,

Lukman Hakim

NIM 120810101174

SKRIPSI

**ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DAN FAKTOR
DETERMINAN PENERAPAN KEMITRAAN USAHA
TANI TEBU RAKYAT**

Studi Kasus: Mitra Tani PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Oleh

Lukman Hakim

NIM 120810101174

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing II : Dr. Moh. Adenan, M.M.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Biaya Transaksi Ekonomi Dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat
Nama Mahasiswa : Lukman Hakim
NIM : 120810101174
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Agribisnis
Tanggal Persetujuan : 2 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P.

NIP. 197207131999031001

Dr. Moh. Adenan, M.M.

NIP. 196610311992031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DAN FAKTOR
DETERMINAN PENERAPAN KEMITRAAN USAHA
TANI TEBU RAKYAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lukman Hakim
NIM : 120810101174
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo S, M.Si (.....)
NIP. 195810241988031001
2. Sekretaris : Drs. Sunlip Wibisono M.Kes (.....)
NIP. 195812061986031003
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati SE., M.Si (.....)
NIP. 196907181995122001
4. Pembimbing I : Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P (.....)
NIP. 197207131999031001
5. Pembimbing II : Dr. Moh. Adenan, M.M (.....)
NIP. 196610311992031001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 196306141990021001

Analisis Biaya Transaksi Ekonomi dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat

Studi kasus : Mitra Tani PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Lukman Hakim

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh luas lahan, kerja, jarak-sawah, produksi, umur, dan total biaya transaksi terhadap penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan data primer dari sampel sebanyak 70 responden. Para responden yang dipilih adalah petani tebu yang menerapkan kemitraan lebih dari satu kali musim tanam dan petani tebu yang menerapkan kemitraan hanya satu kali musim tanam di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Metode analisis yang digunakan adalah *Binary Logistic Regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produksi dan variabel jarak berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel kerja dan total biaya transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Sementara variabel lainnya seperti luas lahan dan umur tidak berpengaruh terhadap penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: penerapan kemitraan, luas lahan, kerja, jarak-sawah, produksi, umur, total biaya transaksi.

*Analysis of transaction cost economics and the determinant factors of
implementation partnership sugarcane farming*

Case study: farmer partnership Sugar Factory, Panji District Situbondo Regency

Lukman hakim

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Bussines, Jember University*

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of land, labor, distance, production, age, and the total transaction costs to the application of the partnership sugarcane farming in the area PG Panji, District Panji Situbondo Regency. To achieve these objectives used primary data from a sample of 70 respondents. Respondents selected were sugar cane farmers who implement the partnership more than one season of planting and sugar cane farmers who have applied the partnership just one growing season in the area PG Panji, District Panji Situbondo Regency. The analytical method used is Binary Logistic Regression. The results of this research showed that variable production and distance are significant and negatif effect while dummy variable working and total cost transaction are significant and positive effect on the implementation of the partnership sugarcane farming in the area PG Panji, District Panji Situbondo Regency. The others variable, land area and age are not significant on the implementation of the partnership sugarcane farming in the area PG Panji, District Panji Situbondo Regency.

Keywords: *implementation of partnerships, land, labor, distance-ricefield, production, age, total transaction costs.*

RINGKASAN

Analisis Biaya Transaksi Ekonomi dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat; Lukman Hakim, 120810101174; 2016; 104 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Salah satu alternatif usaha untuk mengatasi kendala dalam usahatani dapat dilakukan melalui sistem kemitraan. Permasalahan klasik yang dihadapi petani tebu seperti permodalan, manajemen dan pemasaran hasil, dengan kemitraan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani disamping itu juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan mitra. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kemitraan usaha. Dua faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari hubungan kerjasama ini yaitu: tujuan yang ditetapkan bagi kemitraan tersebut dan perilaku atau sifat dan sikap dari pihak yang turut serta dalam kemitraan.

Proses kemitraan akan memunculkan biaya transaksi yang digunakan untuk penegakan kontrak didalam usaha tani. Teori biaya transaksi berasal dari pendekatan Kelembagaan Ekonomi Baru dan berfokus pada tata kelola kelembagaan. Biaya transaksi disebut sebagai biaya tersembunyi, terkadang merupakan biaya yang dapat diamati dan tidak dapat diamati terkait dengan pertukaran barang dan jasa. Biaya transaksi dapat dikategorikan dalam biaya transaksi tetap dan variabel. Biaya transaksi tetap bersifat tetap dengan volume output yang diperdagangkan dan mempengaruhi keputusan partisipasi petani dalam pasar. Biaya transaksi variabel dapat berupa biaya per unit dalam mengakses pasar yang besarnya bervariasi dengan volume yang diperdagangkan dan dapat mempengaruhi keputusan partisipasi pasar serta kuantitas yang

diperdagangkan. Ini termasuk biaya yang terkait dengan mentransfer output yang diperdagangkan seperti biaya transportasi dan waktu yang dihabiskan untuk mengirimkan produk ke pasar. Biaya ini sebagian besar tidak teramati atau tidak dapat dengan mudah direkam dalam survei. Pada dasarnya, biaya transaksi variabel menaikkan harga riil komoditas yang dibeli dan menurunkan harga riil yang diterima untuk komoditas yang dijual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel luas lahan, kerja, jarak-sawah, produksi, umur, dan total biaya transaksi terhadap penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar dimana responden awal dipilih kemudian mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai rekan-rekan lainnya sehingga diperoleh lagi responden tambahan. Ada sebanyak 70 responden yang dipilih untuk mewakili petani tebu yang melakukan penerapan kemitraan dalam usaha tani tebu. Para responden yang dipilih adalah petani tebu yang menerapkan kemitraan lebih dari satu kali musim tanam dan petani tebu yang belum menerapkan kemitraan atau hanya satu kali musim tanam di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah model regresi logistik dengan dua pilihan (*Binary Logistic Regression*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produksi dan jarak-sawah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel kerja dan total biaya transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Selanjutnya variabel luas lahan berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel umur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat di daerah PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Total variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 26,2891% Sedangkan sisanya 73,7109% dijelaskan variabel lain diluar model.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Biaya Transaksi Ekonomi Dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberikan saran, kritik dan pengarahan yang bermanfaat bagi penulis;
3. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
5. Bapak Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama studi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

7. Ayahanda Drs., Ec., H. Herman, M.Si. dan Ibunda Hj. Nanik Sofiyati, terima kasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan selama ini;
8. Kakakku Alif Juliyan Nurrahman, S.ST., yang telah sabar dan ikhlas membimbing, memotivasi serta mendoakan tanpa kenal lelah;
9. Adikku Qonita Karimah Herfiyah dan Dhevi Indrawati S.Kom., yang selalu menjadi tempat berbagi, memberi semangat, serta doa dengan sepenuh hati;
10. Ibu Gravika selaku Ketua KPTR yang telah memberikan dukungan dan bantuan demi penulisan skripsi ini;
11. Sahabatku RR. Moh. Faqieh atas semua dukungan, kebersamaan dan perjalanan hidup yang tak akan tergantikan oleh apapun;
12. Segenap keluarga besar Konsentrasi Agribisnis dan Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2012 terima kasih atas semua dukungan dan pengalaman selama masa perkuliahan;
13. Teman satu atap JL Kaliurang Gg Swadaya No 1, Robi, Endri, Holis, Yuli, Dhimas yang selalu kompak, terima kasih semuanya;
14. Semua pihak yang telah mambantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 2 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Kelembagaan.....	14
2.1.2 Biaya transaksi	18
2.1.3 Kemitraan.....	24
2.1.4 Kontrak	355
2.1.5 Pengertian Tebu Rakyat Intensifikasi	39

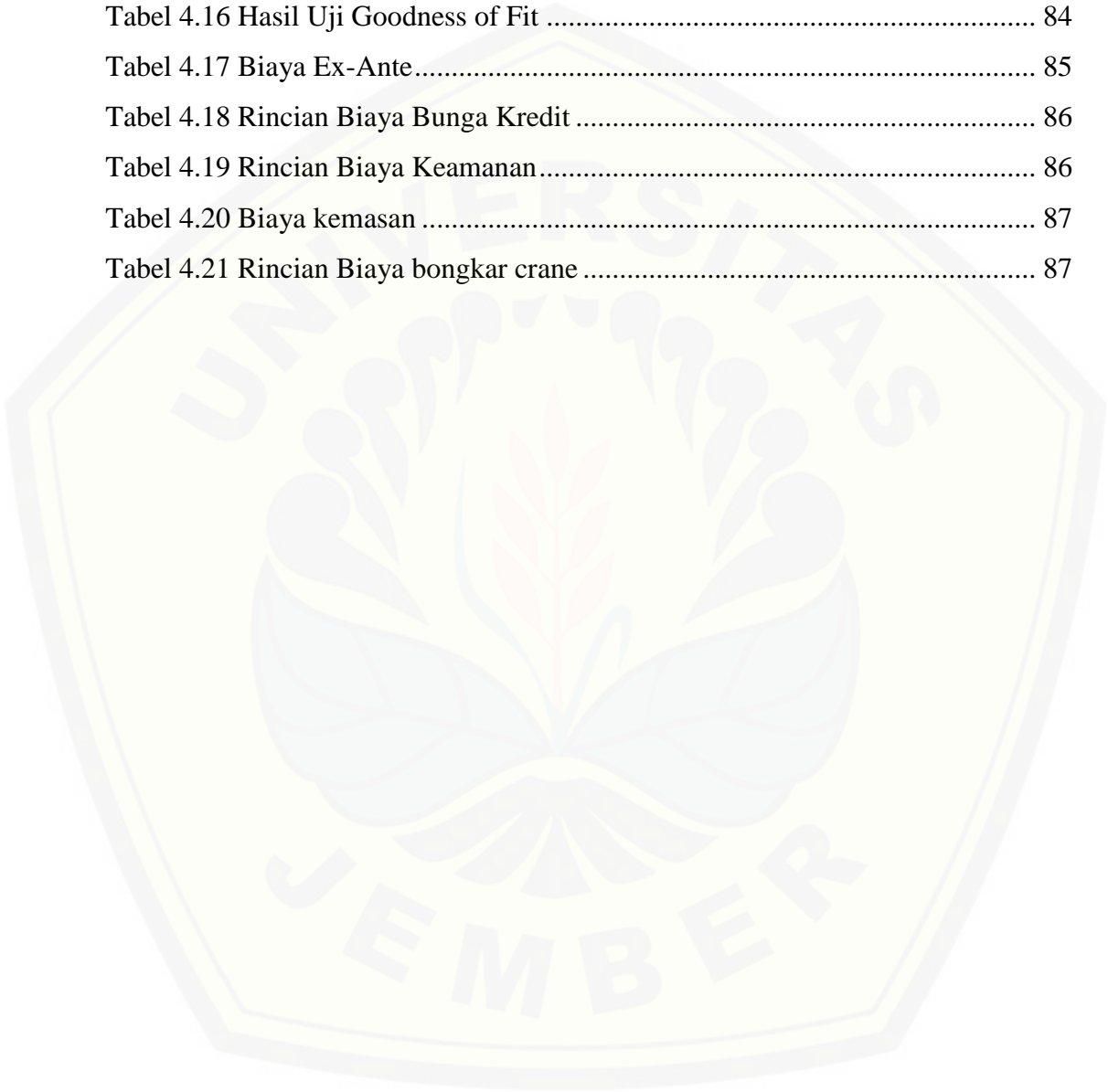
2.2	Determinan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat (Definisi Variabel)	39
2.2.1	Pengertian Usahatani	39
2.2.2	Faktor Produksi Usahatani.....	40
2.2.3	Pengertian Luas Lahan.....	40
2.2.4	Pengertian Umur	41
2.2.5	Pengertian Jarak Tempat Tinggal	41
2.2.6	Biaya Transaksi.....	41
2.3	Penelitian Sebelumnya.....	42
2.4	Kerangka Konseptual.....	48
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	50
3.1	Rancangan Penelitian	50
3.1.1	Jenis Penelitian	50
3.1.2	Unit Analisis	50
3.1.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
3.1.4	Populasi dan Sampel.....	51
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	52
3.3	Teknik Pengumpulan Data	53
3.4	Metoda dan Alat Pengumpulan Data.....	53
3.4.1	Metode Pengamatan (<i>Observasi</i>).....	53
3.4.2	Metode Wawancara (<i>Interview</i>).....	53
3.4.3	Metode Studi Literatur.....	53
3.5	Metoda penyajian dan Analisi data.....	53
3.5.1	Analisis Model Regresi Logistik (<i>Logistic Regression Model</i>).....	53
3.5.2	Uji Estimasi Parameter	55
3.6	Definisi Variabel Operasional.....	58
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian	61
4.1.1	Kondisi Geografis Kabupaten Situbondo	61
4.1.2	Penggunaan Lahan	63
4.1.3	Keadaan Ketinggian Wilayah	63

4.1.4	Gambaran Umum Keadaan Wilayah Kecamatan Panji.....	65
4.1.5	Keadaan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.....	66
4.1.6	Keadaan Tanaman Perkebunan.....	69
4.2	Gambaran Umum Variabel Penelitian	70
4.2.1	Keadaan Responden Menurut Penerapan Kemitraan Dalam Usaha Tani Tebu.....	70
4.2.2	Keadaan Responden Menurut Luas Lahan	70
4.2.3	Keadaan Responden Menurut Umur Petani.....	71
4.2.4	Keadaan Responden Menurut Produksi Tebu	72
4.2.5	Keadaan Responden Menurut Jarak	72
4.2.6	Keadaan Responden Menurut Dummy kerja.....	73
4.3	Hasil Analisis Data	74
4.3.1	Hasil Analisis Biaya Transaksi	74
4.3.2	Hasil Analisis Model Regresi Logistik.....	75
4.3.3	Uji Estimasi Parameter	76
4.4	Pembahasan.....	84
4.4.1	Biaya Transaksi.....	84
4.4.2	Variabel Independen	88
BAB 5. PENUTUP		96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Luas Areal Tebu Di Indonesia (ha) Tahun 2012 – 2014*	4
Tabel 1.2 Perkembangan Produksi Tebu Di Indonesia (Ton) Tahun 2012 – 2014*	5
Tabel 1.3 Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Tebu Di Situbondo 2008-2014.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	45
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo.....	62
Tabel 4.2 Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 ..	63
Tabel 4.3 Letak Ketinggian Tempat Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2014	64
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk (Jiwa) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014	66
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk (Jiwa) menurut kelompok umur (Th) dan Jenis Kelamin	67
Tabel 4.6 Lapangan Pekerjaan Menurut Laju Pertumbuhan Ekonomi	68
Tabel 4.7 Luas Areal (Ha), Produksi (Ton), dan Produktifitas/Hasil (Kg/Ha) Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi.....	68
Tabel 4.8 Jumlah Responden Di Kabupaten Situbondo Menurut Penerapan Kemitraan.....	69
Tabel 4.9 Jumlah Responden Di Kabupaten Situbondo Menurut Luas Lahan	71
Tabel 4.10 Jumlah Responden Di Kabupaten Situbondo Menurut Umur Petani .	71
Tabel 4.11 Jumlah Responden Di Kabupaten Situbondo Menurut Produksi Tebu	72
Tabel 4.12 Jumlah Responden Di Kabupaten Situbondo Menurut Jarak dari Rumah-Sawah	73
Tabel 4.13 Jumlah Responden Di Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Pekerjaan	73

Tabel 4.14 Biaya Transaksi Ekonomi Penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat	74
Tabel 4.15 Hasil Analisis Model Regresi Logistik Dengan Dua Pilihan (Binary Logistic Regression).....	76
Tabel 4.16 Hasil Uji Goodness of Fit	84
Tabel 4.17 Biaya Ex-Ante.....	85
Tabel 4.18 Rincian Biaya Bunga Kredit	86
Tabel 4.19 Rincian Biaya Keamanan.....	86
Tabel 4.20 Biaya kemasan	87
Tabel 4.21 Rincian Biaya bongkar crane	87

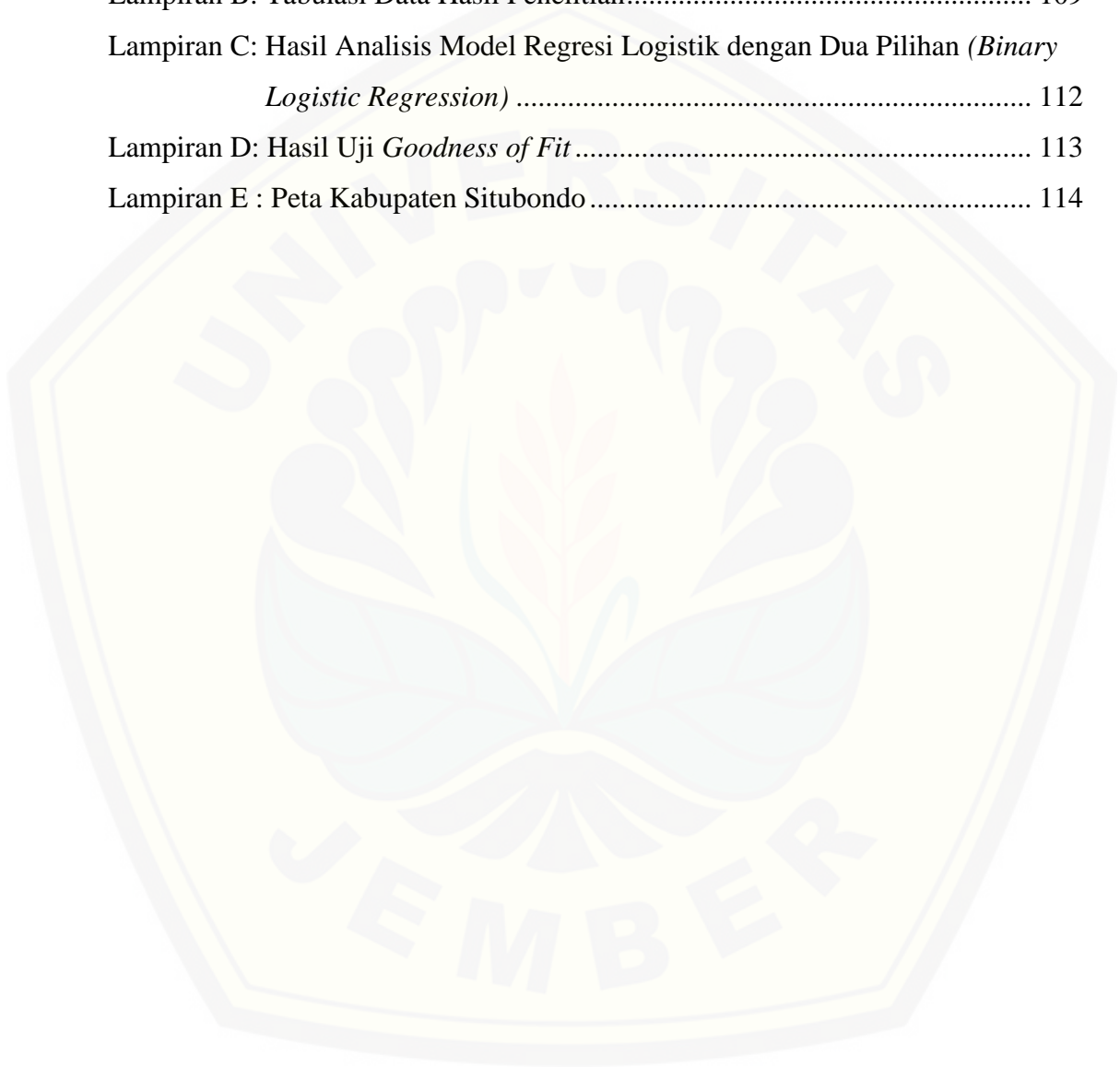


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Tebu menurut Status Pengusahaan, 2012-2014*	5
Gambar 1.2 Perkembangan Produksi Tebu 2012-2014*	6
Gambar 1.3 Skema Distribusi Tebu (Sumber : Data Primer 2016, di olah)	11
Gambar 2.1 Kondisi Kemitraan Tipe Dipersial	27
Gambar 2.2 Kondisi Kemitraan Tipe Sinergis	28
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A: Kuesioner Penelitian.....	105
Lampiran B: Tabulasi Data Hasil Penelitian.....	109
Lampiran C: Hasil Analisis Model Regresi Logistik dengan Dua Pilihan (<i>Binary Logistic Regression</i>)	112
Lampiran D: Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i>	113
Lampiran E : Peta Kabupaten Situbondo	114



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2005 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Indonesia memiliki potensi menjadi produsen tanaman perkebunan dunia karena dukungan agroekosistem, luas lahan dan tenaga kerja. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB sekitar 3,77 persen pada tahun 2014 yang merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa. Subsektor perkebunan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena sektor ini menjadi sumber matapencaharian bagi puluhan juta rakyat Indonesia mulai dari industri hulu sampai dengan hilir (Mawardi, 2008).

Perkebunan mempunyai berbagai potensi pengembangan agribisnis yang baik dan menguntungkan. Potensi pengembangan komoditi perkebunan di Indonesia sangat besar seperti potensi pengembangan komoditi pertanian lainnya, tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan, yaitu : strategi, pembangunan, dan kelembagaan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan secara tidak langsung untuk menciptakan konsepsi yang kondusif. Kebijakan yang secara langsung mendorong perkembangan agribisnis dalam aspek: kemitraan, keuangan, teknologi dan aspek informasi sangat diperlukan (Rachbini, 1997). Pengembangan komoditas perkebunan menyangkut produktivitas tanaman yang belum optimal, kualitas produk belum memenuhi standar perdagangan, proses diversifikasi (vertikal dan horizontal) belum memadai, dan peran kelembagaan yang masih lemah. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui perbaikan teknik

budidaya, peningkatan mutu melalui pengembangan penerapan pasca, diversifikasi dan pengembangan pemasaran. Produk perlu terus diupayakan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi siap pakai di perkebunan (Saragih, 2001).

Jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan meliputi tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan yaitu tanaman yang terus menerus tumbuh dan tidak terbatas, pertumbuhan barunya tiap tahun dengan sedikit kerusakan dari bagian atas tanah. Jenis tanaman tahunan yang dominan ditanam di Indonesia antara lain karet, kopi, sawit, teh, lada, cengkeh, kakao, pala dan kayu manis. Berbeda dengan tanaman tahunan, tanaman semusim merupakan tanaman yang lingkaran siklus hidupnya dalam satu musim tanam. Jenis tanaman semusim yang dominan di Indonesia antara lain tebu, kapas, nilam dan kapulaga (Pujiyanti, 1998).

Subsektor perkebunan tersebut salah satunya adalah tanaman tebu yang memiliki arti penting sebagai bahan baku pada industri gula. Tebu sebagai bahan baku industri gula merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Industri gula berbahan baku tebu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi ribuan petani tebu dan pekerja di industri gula. Gula juga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat dan sumber kalori yang relatif murah.

Tahun 1928 industri gula menghasilkan tiga perempat dari ekspor di wilayah Jawa, dan menyumbang seperempat dari seluruh penerimaan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat 178 pabrik gula di Jawa dengan luas areal tebu yang dipanen kira-kira 200.000 hektar dengan produktifitas 14,8 persen dan rendemen mencapai 11-13,8 persen. Besarnya produktivitas tebu telah menghasilkan hampir 3 juta ton gula dimana hampir separuhnya diekspor (sekitar 2,4 juta ton). Tujuan pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk keperluan ekspor. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia pernah menjadi eksportir terbesar kedua setelah Kuba (Mubyarto, 1984; dan Sabrina, 2011). Pada jaman kolonial, usahatani tebu telah diusahakan oleh masyarakat pedesaan yang pelaksanaannya diatur oleh pabrik gula dengan cara menyewa lahan milik petani. Pabrik gula

bertanggung jawab terhadap semua tanaman dan penggilingan tebu, sedangkan petani hanya menyewakan tanah miliknya kepada pabrik (Mubyarto dan Daryanti, 1991).

Sistem pengusahaan tebu diubah oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 (Asnur, 1999; dan Mardianto et al, 2005). Inpres No. 9 Tahun 1975 ini mengganti sistem pola tanam yang semula menganut sistem gלבagan menjadi sistem Tebu Rakyat Intensif (TRI). Sistem TRI ini yang menjadikan petani sebagai produsen tebu utama dan pabrik gula sebagai mitra usaha petani serta membimbing petani dalam usahatannya tersebut. Inpres No 9 Tahun 1975 menghendaki petani menjadi “tuan” di tanahnya sendiri. Namun pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut banyak disalahgunakan. Banyak lahan petani yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu, dalam konteks ini yang dimaksud dengan oknum adalah para cukong yang membeli hak petani sebagai objek dari TRI.

Sistem Tebu Rakyat Intensif (TRI) berakhir saat dicabutnya Inpres No. 9 Tahun 1975. Inpres No. 5 Tahun 1998 dibuat untuk mengganti Inpres No. 9 Tahun 1975 yaitu dengan memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan dijadikan usahatannya, tidak harus dengan menanam tebu. Pemerintah membebaskan bea cukai tebu yang merugikan petani tebu, akibatnya produksi gula terus mengalami penurunan selama beberapa tahun berikutnya. Keterpurukan industri gula yang terjadi di Indonesia mendorong Presiden Soeharto untuk meningkatkan produksi pertanian. Adanya kebebasan bea cukai tebu tersebut menyebabkan banyaknya produk-produk gula impor yang secara bebas masuk ke dalam negeri (Pakpahan, 2003).

Sistem pola tanam yang berlaku saat ini adalah pola tanam tetap (Nuryanti, 2007). Lahan yang saat ini digunakan untuk diusahakan usahatani tebu, seterusnya akan ditanami tebu. Pola tanam yang dilakukan petani dalam budidaya tebu saat ini terdiri dari pola tanam awal dan pola tanam keprasan. Pola tanam awal merupakan pola tanam tebu yang dimulai dari penanaman bibit sedangkan pola keprasan yaitu suatu pola tanam di mana panen dapat dilakukan beberapa kali dalam masa sekali tanam. Pola tanam keprasan biasa dilakukan maksimal sampai

3 kali. Lahan yang digunakan petani untuk menanam tebu yaitu lahan sawah dan lahan tegalan.

Masing-masing pola tanam memberikan hasil yang berbeda untuk tingkat rendemen tebu. Penelitian yang dilakukan Nuryanti (2007) menyatakan tingkat rendemen tebu yang dihasilkan pola tanam awal lebih banyak dibandingkan tanaman tebu dengan pola tanam keprasan. Di samping perbedaan hasil pola tanam tersebut, biaya yang dikeluarkan juga berbeda. Pola keprasan lebih menguntungkan daripada pola tanam awal, biaya bibit untuk pola tanam awal mahal, biaya tenaga kerja yang lebih besar pada pola tanam awal, pola tanam awal memerlukan biaya penanaman untuk budidaya tebu sementara pada pola keprasan, biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengganti tanaman yang telah mati (penyulaman).

Perkembangan luas areal perkebunan tebu di Indonesia selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 lahan perkebunan tebu Indonesia tercatat seluas 442,66 ribu hektar, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 yaitu sekitar 6,39 persen menjadi 470,94 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2014 luas areal perkebunan tebu Indonesia mengalami peningkatan menjadi 472,68 ribu hektar atau sekitar 0,37 persen. Perkembangan luas areal perkebunan tebu dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Luas Areal Tebu Di Indonesia (ha) Tahun 2012 – 2014*

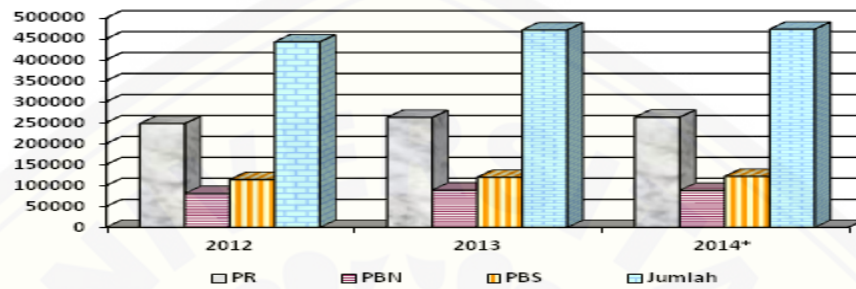
Tahun	PR	PBN	PBS	Jumlah	Pertumbuhan
2012	247 750	80 890	114 018	442 658	-
2013	262 280	89 015	119 646	470 941	6,39
2014*	262 880	88 275	121 521	472 676	0,37

Sumber : BPS Tahun 2014

Keterangan : *)Angka Sementara

Apabila dilihat dari status pengusahaannya, perkebunan tebu di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Pada tahun 2014 luas areal perkebunan tebu di Indonesia seluas 472,68 ribu hektar, sekitar 262,88 ribu hektar

(55,61%) diantaranya diusahakan oleh perkebunan rakyat, sedangkan yang diusahakan oleh perkebunan besar negara seluas 88,28 ribu hektar (18,68%) dan perkebunan besar swasta seluas 121,52 ribu hektar (25,71%). Perkembangan luas areal perkebunan tebu menurut status perusahaan tahun 2012-2014 disajikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Tebu menurut Status Perusahaan, 2012-2014* (Sumber : BPS, 2014)

Perkembangan produksi tebu di Indonesia selama tiga tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2012 produksi Tebu (setara gula) mencapai 2,59 juta ton dan turun 1,5 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,55 juta ton. Pada tahun 2014 produksi tebu mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen atau menjadi 2,58 juta ton. Perkembangan produksi tebu Indonesia tahun 2012 sampai 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perkembangan Produksi Tebu Di Indonesia (Ton) Tahun 2012 – 2014*

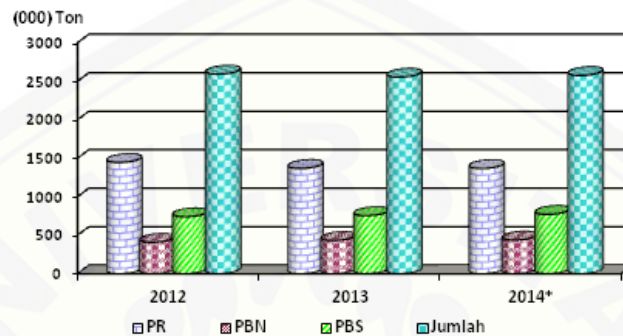
Tahun	PR	PBN	PBS	Jumlah	Pertumbuhan
2012	1 445 053	407 944	739 564	2 592 561	-
2013	1 368 208	431 310	754 033	2 553 551	-1,50
2014*	1 367 101	437 628	770 663	2 575 392	0,86

Sumber : BPS Tahun 2014

Keterangan : *)Angka Sementara

Persentase luas areal perkebunan tebu yang diusahakan oleh perkebunan rakyat mencapai 55,61 persen terhadap total luas areal perkebunan tebu Indonesia,

sedangkan produksi dari perkebunan rakyat sekitar 53,08 persen dari total produksi tebu Indonesia, hal ini berarti produktivitas dari perkebunan rakyat umumnya lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas perkebunan besar baik negara maupun swasta. Perkembangan produksi tebu menurut status perusahaan tahun 2012-2014 disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Perkembangan Produksi Tebu 2012-2014* (Sumber : BPS, 2014)

Persentase produksi tebu yang diusahakan oleh perkebunan rakyat selama periode tahun 2012 - 2014 yakni berkisar 53,08 - 55,74 persen, sedangkan perkebunan besar negara berkisar 15,74 - 16,99 persen dan untuk perkebunan besar swasta berkisar 28,53 - 29,92 persen. Produksi tebu Indonesia tahun 2014 sebesar 2,58 juta ton yang berasal dari perkebunan rakyat sebesar 1,37 juta ton (53,08%), perkebunan besar negara sebesar 0,434 juta ton (16,99%) dan perkebunan besar swasta sebesar 0,77 juta ton (29,93%).

Selama periode tahun 2012 sampai tahun 2014 areal perkebunan tebu tersebar di 9 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Dari ke 9 provinsi tersebut, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan areal perkebunan tebu yang terluas di Indonesia. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan tebu yang berada di Provinsi Jawa Timur tercatat seluas 219,78 ribu hektar atau merupakan 46,50 persen dari total luas areal perkebunan tebu di Indonesia. Sementara itu provinsi lain yang juga memiliki luas areal perkebunan tebu yang cukup besar yakni Lampung (24,26%), Jawa Tengah (11,97%), dan Sumatera Selatan (5,09%). Peningkatan luas area perkebunan tebu ini sejalan

dengan direncanakannya Kebijakan Swasembada Gula pada tahun 2007 (Surono, 2006).

Produksi tebu yang terbesar berasal dari Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 produksi tebu yang berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 1,26 juta ton yang berarti sekitar 48,85 persen dari total produksi tebu Indonesia. Sementara itu provinsi lainnya yang juga merupakan penghasil tebu yang cukup besar yakni Lampung sebesar 749,25 ribu ton (29,09%), Jawa Tengah sebesar 239,96 ribu ton (9,32%), dan Jawa Barat 116,05 ribu ton (4,51%).

Di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar diantaranya adalah produksi dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, tambak, hatchery, peternakan dan kehutanan. Tanaman perkebunan yang mampu memberikan kontribusi terhadap nilai tambah di sektor ini diantaranya komoditi tebu, kelapa, kopi, tembakau, kapuk, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jambu mente, pinang dan biji jarak. Tabel 1.3 merupakan tabel luas areal dan produksi perkebunan tebu di Kabupaten Situbondo.

Tabel 1.3 Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Tebu Di Situbondo 2008-2014

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Luas areal	8 145	7 086	7 139	8 224	8 236	8 822	8 022
Produksi	49 015	42 133	41 756	60 097	47 852	63 253	49 884

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka, tahun 2015

Dalam Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa luas lahan tanaman tebu dari tahun 2008 sampai 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 luas lahan perkebunan tanaman tebu sebesar 8.145 ha untuk tahun 2009 menurun mencapai 7.086 ha atau sedangkan tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 mengalami penurun kembali sebesar 8.022 ha. Sedangkan pada skala produksi mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan dari 49.015 menjadi 42.133 ton. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011, dengan total produksi 60.097 ton. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan dengan total produksi 63.253 ton. Flutuasi yang terjadi akibat dari ketidak stabilan perekonomian dalam negeri yang berimbas pada

industri gula di Kabupaten Situbondo. Untuk meningkatkan kembali produksi gula pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa swasembada gula.

Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan, diantara empat Kecamatan tersebut terdapat PG, yaitu : (1) PG Panji, Kec. Panji. (2) PG Wiringin Anom, Kec. Panarukan. (3) PG Asembagus, Kec. Asembagus. (4) PG Olean, Kec. Situbondo. Dari semua PG yang berada di Kabupaten Situbondo untuk wilayah kerjanya masuk dalam pengawasan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero). Pada tahun 2011, PG Panji merencanakan giling tebu sebanyak 200.015,0 ton (tebu sendiri 34.415,0 ton dan tebu rakyat 165.600,0 ton) yang diperoleh dari areal seluas 2.580,6 ha (TS 460,0 ha dan TR 2.120,0 ha). Gula dihasilkan diproyeksikan mencapai 15.139,0 ton (milik PG 6.726,3 ton dan milik petani 8.412,7 ton) dan tetes 9.000,7 ton. Selain areal berasal dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo (tebu yang tidak tergiling di PG Asembagus), juga terdapat di Kabupaten Jember yang pembinaannya dilakukan PG Pandjie sejak awal. Kapasitas PG 1.700 tth (tidak termasuk jam berhenti) atau 1.471,9 tth sudah termasuk jam berhenti.

PG Panji beberapa kali mengalami pemantapan kapasitas sejalan meningkatnya ketersediaan tebu dari yang semula hanya 1.100 tth. Pengembangan areal terus dilakukan, baik TS maupun TR, seiring kapabilitas PG untuk menggiling tebu lebih banyak. Sasaran utama adalah daerah sawah berpengairan teknis yang secara agronomis juga digunakan untuk budidaya padi dan palawija. PG Panji yakin melalui penerapan agroeko teknologi, kecukupan *agroinputs*, penataan masa tanam, dan perbaikan manajemen tebang-angkut, produktivitas yang meningkat akan menjadi daya tarik bagi petani untuk menjadikan tebu sebagai komoditas alternatif. Selain itu, pengembangan juga dilakukan ke lahan kering sepanjang air dapat dipompa secara artesis. Upaya menarik animo petani juga dilakukan melalui perbaikan kinerja pabrik dan kelancaran giling. Sadar akan pentingnya tebu rakyat dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pengembangan PG lebih lanjut, pelayanan prima kepada petani terus diupayakan dengan sebaik-baiknya.

Secara rutin, PG menyelenggarakan *Forum Temu Kemitraan* (FTK) guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi petani, baik di luar maupun dalam masa giling. Dalam upaya peningkatan produktivitas, PG Panji antara lain melakukan optimalisasi masa tanaman dan penataan varietas menuju komposisi ideal dengan proporsi antara masak awal, tengah dan akhir dengan sasaran 2010/11 berbanding 30-40-30. Melalui kebun semacam ini, petani diharapkan dapat belajar lebih banyak tentang pengelolaan kebun melalui *best agricultural practices*.

Untuk menjaga agar produksi gula jangan sampai menurun serta meningkatkan pendapatan khususnya petani tebu, langkah yang ditempuh pemerintah adalah melalui program kemitraan yang dikenal dengan Tebu Rakyat Mandiri dan Tebu Rakyat Kerja Sama Usahatani atau Tebu Rakyat Kredit (Mirzawan, 2001; dalam Riana, 2011).

Bentuk kerjasama yang terjalin antara petani dan PG Panji ada dua macam, yaitu: Tebu Rakyat Kerjasama Usaha (TRKSU) dan Tebu Rakyat Mandiri (TRM). TRKSU merupakan kemitraan kerjasama usaha antara petani tebu dengan pabrik gula, dimana pabrik gula memberikan biaya garap, bibit, pupuk, hebrisida, dan alat-alat, selain itu petani diberikan bimbingan teknis dan penyuluhan serta jaminan pengolahan seluruh hasil panen oleh pabrik gula. TRM merupakan bentuk kerjasama antara tebu rakyat dengan pabrik gula dimana mengembangkan usahatannya secara swadaya dengan pengolahan hasil panennya oleh pabrik gula yang menjadi mitra kerjanya. Petani tebu rakyat yang bermitra dengan PG Panji untuk mendapatkan bantuan kredit harus membentuk kelompok tani. Hal ini dilakukan guna mempermudah proses pemberian kredit agar berjalan secara efisien.

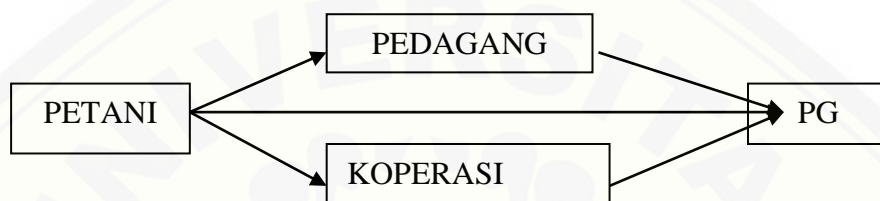
Hubungan kemitraan ini dirintis antara lain dengan terbentuknya Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), yang dari segi teori pengembangan organisasi dapat dilihat sebagai perubahan yang menuntut pabrik gula untuk mengembangkan organisasi melalui hubungan “kemitraan” dalam bisnisnya. Pola didasarkan pada prinsip saling menguntungkan sebagai pemroses (mengolah tebu menjadi gula). Keberadaan keduanya sejajar satu sama lain. Menyatukan sikap dan perilaku yang

heterogen akan membuat petani menyukai visi dan misi yang sama dengan pabrik gula pembina (Mirzawan, 2001; dalam Riana, 2011).

Tujuan kemitraan sesungguhnya yang diharapkan oleh masing-masing pihak dapat mencapai kesetaraan walau pada pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala, diantaranya yaitu:

1. Informasi pasar, Petani kontrak (TRK) memiliki keterbatasan mengenai informasi yang didapat selain dari pihak penyuluh PG yang membina petani mengakibatkan kurangnya informasi bagi petani untuk memaksimalkan hasil tebuinya. Berbeda dengan petani non kontrak (TRM) yang dapat bebas menyetorkan hasil tebuinya ke pabrik-pabrik gula lain yang mampu membeli tebu dengan harga tinggi sehingga petani dapat memperoleh pendapatan lebih banyak. Tidak semua pabrik-pabrik gula menerima tebu dari petani non kontrak disebabkan antara lain karena target input bahan baku tebu telah terisi oleh petani kontrak, kualitas tebu petani non kontrak kurang bagus karena bukan hasil penyuluhan pihak PG sehingga menyebabkan resiko yang dihadapi petani tebu non kontrak lebih besar dikarenakan biaya transaksi yang dikeluarkan cukup besar.
2. Isu rendemen. Penentuan rendemen pada sistem bagi hasil merupakan hal yang krusial karena menentukan pendapatan petani dan pabrik gula. Sering kali dijumpai di lapangan perselisihan antara petani dan pabrik gula dalam masalah rendemen tebu. Petani menganggap bahwa penentuan rendemen oleh pabrik gula tidak transparan dan cenderung merugikan petani. Banyak orang berpendapat bahwa ketentuan sistem bagi hasil tebu itu kurang adil karena pabrik gula yang hanya menggiling tebu mendapatkan bagian yang cukup besar. Selain itu masih terdapat pandangan bahwa masih ada hasil sampingan dari tebu yang tidak dibagi. Anggapan orang demikian memang sepintas masuk akal, tetapi perusahaan gula berpendapat lain karena ketentuan bagi hasil sangat ketat dalam kaitannya dengan pengoperasian perusahaan secara ekonomis. Oleh karena itu peran kemitraan muncul sebagai sarana memaksimalkan pendapatan dengan menekan biaya transaksi yang muncul pada saat menciptakan kontrak.

Alasan utama peninjauan kembali ketentuan sistem bagi hasil adalah meningkatkan pendapatan petani sehingga pemasok bahan baku dan pabrik gula sebagai pemroses bahan baku yang sama-sama tidak mau dirugikan meskipun cara seperti itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi pabrik gula, tetapi apabila ditunjang peningkatan mutu tebu bermanfaat bagi petani maupun pabrik gula (Mirzawan, 2001; dalam Riana, 2011). Pendistribusian tebu dari petani ke PG terdapat beberapa tahap yang akan digambarkan pada gambar 1.3.



Gambar 1.3 Skema Distribusi Tebu (Sumber: Data Primer 2016, di olah)

Berdasarkan Gambar 1.3, skema distribusi tebu dari petani untuk mencapai PG terdapat dua jalur, yaitu :

1. Dalam pendistribusiannya, petani menjual hasil panennya melalui perantara, yaitu pedagang dan Koperasi “Mitra Tani”, sampai kemudian hasil panen tersebut sampai ke PG.
2. Petani dapat menjual langsung hasil panennya ke PG.

Saat musim panen tiba, petani tebu harus segera menjual tebunya ke PG agar rendemen (satuan berat kristal gula yang dihasilkan dari seratus kilogram tebu) yang terdapat pada tanaman tebu tidak banyak berkurang. Dalam operasionalisasi, PG memiliki kapasitas maksimum dalam menampung tebu untuk diolah sehingga terdapat sistem antrian untuk memasukkan hasil tebu ke PG. Padahal jika hasil panen tebu tidak segera diolah, maka rendemen yang ada dalam tebu akan berkurang. Berkurangnya rendemen tebu berarti berkurangnya pendapatan bagi petani. Antrian untuk memasuki PG tersebut yang menjadi kendala bagi petani. Petani harus membayar lebih besar agar dapat memasukkan hasil panennya dengan antrian yang lebih awal.

Saat mendistribusikan hasil panen tebu agar sampai di PG tepat waktu (dengan tujuan rendemen tidak banyak berkurang) banyak biaya yang harus

dikeluarkan oleh petani. Seringkali biaya-biaya tersebut tidak dimasukkan ke dalam penentuan harga jual tebu karena biaya-biaya tersebut tidak termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya rokok dan makan untuk supir yang mengangkut hasil panen, biaya petugas agar mendahulukan panen masuk ke PG, dan lain-lain. Biaya yang timbul tersebut telah mengurangi pendapatan petani.

1.2 Rumusan Masalah

PG Panji merupakan pabrik gula yang beroperasi di bawah naungan Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara XI (Persero) bekerja sama dengan petani tebu rakyat, agar program Swasembada gula di Jawa Timur khususnya Kabupaten Situbondo tercapai. Maka Sasaran kapasitas olah tebu giling di PG Panji harus lebih efektif dan efisien, namun saat ini masih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan petani enggan untuk melakukan usahatani tebu meskipun hasil dari bertani tebu sangat menjanjikan jika dikerjakan dengan baik dan benar. Dengan demikian sangat penting untuk mengetahui secara mendalam tentang faktor determinan penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat dan besarnya biaya transaksi yang harus ditanggung petani tebu rakyat dengan pola kemitraan, karena dengan begitu diharapkan dapat meyakinkan petani agar mau melakukan usahatani tebu, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana biaya transaksi ekonomi dalam penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat ?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat ?

1.3 Tujuan Penelitian

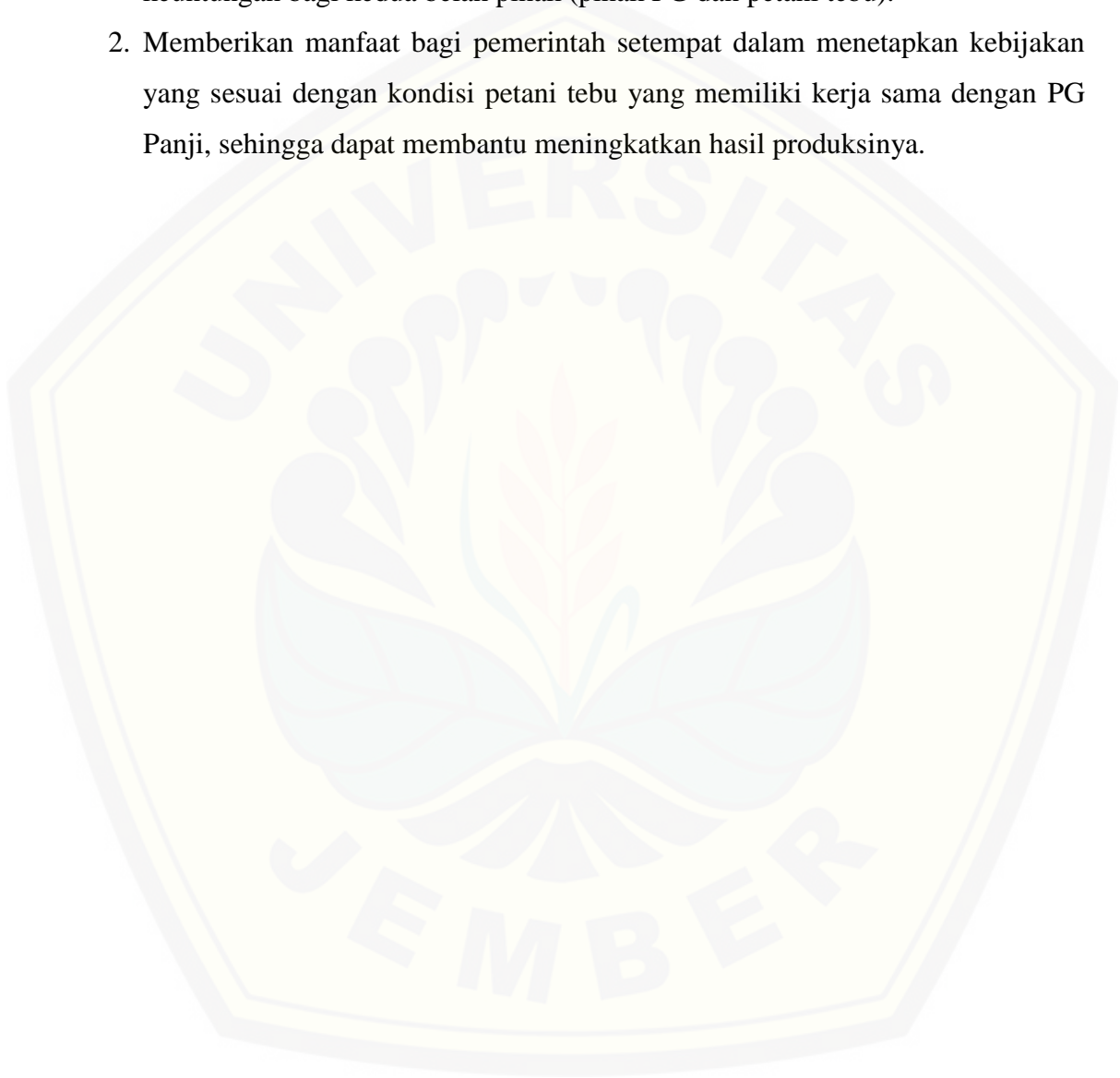
Dari rumusan masalah di atas, secara umum diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis besarnya biaya transaksi ekonomi yang dikeluarkan oleh usaha tani tebu rakyat kemitraan.
2. Menganalisis faktor determinan penerapan kemitraan pada usaha tani tebu rakyat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak PG untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan kerja sama dengan petani sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (pihak PG dan petani tebu).
2. Memberikan manfaat bagi pemerintah setempat dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi petani tebu yang memiliki kerja sama dengan PG Panji, sehingga dapat membantu meningkatkan hasil produksinya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kelembagaan

Peranan kelembagaan dalam kegiatan produksi adalah mengorganisasikan sumber-sumber interdependensi antar partisipan yang pada akhirnya menentukan tingkat efisiensi, pemerataan dan keberlanjutan produksi yang dilaksanakan (Anwar, 1995a:5). Dalam konteks perubahan kelembagaan, beberapa ekonom percaya bahwa kelembagaan hanya akan eksis dalam bidang ekonomi apabila keberadaannya efisien, karena merupakan hasil kompetisi potensial dan aktual di antara beberapa kesepakatan kelembagaan alternatif (Yustika, 2004:26).

Lembaga adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap serta sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder. Unsur-unsur kelembagaan primer mencakup pemerintah, kekayaan, industri, pendidikan, agama dan keluarga (Hanafie, 2010).

Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Anantanyu, 2011).

1) Konsep kelembagaan

North (1990) mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan permainan yang bersangkutan dan berbeda dari para pemainnya. Oleh karena itu aturan-aturan yang bersifat formal dan informal dari aturan permainan (*the rules of the game*), yang menurut definisi aturan formal dari permainan ekonomi tidak dapat dibangun (dirubah) oleh para pemainnya. Sementara para pelaku bermain dengan aturan yang ada, tetapi permainan tersebut harus ditentukan sebelum permainan dilaksanakan. Siapa yang menentukan aturan-aturan (permainan) ekonomi tersebut? North menarik perbedaan tajam antara institusi sebagai *the rules of the game* dan para pemain (*players*) dari permainan (*game*) yang dilakukan oleh organisasi dan pemanfaat kesempatan politik yang bertindak sebagai *agents* suatu perubahan institusi (*institutional reforms*), yaitu sebagai pembuat aturan permainan (*the rules maker of the game*).

Aturan-aturan yang ada membentuk sistem insentif pemain (dalam organisasi) berkaitan dengan bagaimana mentransaksikan (biaya dan manfaat) dan apa yang dapat di-inovasi-kan secara kreatif, yang akhirnya membangkitkan permintaan efektif (*effective demand*) untuk menyusun peraturan-peraturan baru (*reformation*) sebagai response terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga-harga relatif (*relative prices*). Pengaturan baru akan dinegosiasikan dan ditentukan dalam pasar politik (*political market*) melalui pilihan kolektif yang dibangun sesuai dengan pengaturan politik. Sistem politiklah yang mendefinisikan dan memaksakan (*enforces*) aturan ekonomi permainan ekonomi (*economic games*) (North, 1975; dalam Suciati, 2014).

2) Hubungan Kelembagaan

Kardiat (2002:69) menyatakan hubungan kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pabrik Gula dan Petani
 - a. Pabrik gula dan petani merupakan pelaksana program ITR (Inti Tebu Rakyat dan Tebu Rakyat) keduanya harus menjalin kerjasama yang kompak dan efektif untuk mencapai mutu intensifikasi yang baik.

- b. Hubungan kerjasama pabrik gula dan PTR diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang dinamis berdasarkan azas manfaat dan kepercayaan yang tinggi.
- c. PTR sebagai penghasil tebu memerlukan pabrik gula sebagai sumber teknologi, pembimbing teknis dan pengolah hasil tebu menjadi gula yang dapat dipasarkan.
- d. Selanjutnya hubungan petani dan pabrik gula dikembangkan kearah tahapan mitra usaha, dimana petani telah mampu melaksanakan usaha tani tebu secara profesional dan dapat memandang pabrik gula sebagai peluang pasar untuk kemajuan usahanya. Hubungan kerjasama dengan pabrik gula dikembangkan menjadi hubungan kegiatan ekonomi yang bersifat kontraktual.
- e. Dengan kemampuan yang sudah berkembang itu, petani mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan dengan kemampuan sendiri.

3) Hubungan KUD/KPTR, Petani dan Pabrik Gula

- a. KUD/KPTR berfungsi sebagai lembaga pelayanan yang harus dapat menyediakan kebutuhan petani secara tepat yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat, dan tepat waktu.
- b. Pelaksanaan logistik ini memerlukan KUD/KPTR yang berkemampuan tinggi, memerlukan dukungan aktif petani anggotanya, serta jalinan hubungan kerjasama yang serasi dengan lembaga pelayanan yang mendukungnya.
- c. Saat ini untuk pelayanan kebutuhan petani yang menjadi avalist pabrik gula. Pada saatnya nanti apabila KPTR/KUD telah mampu, perlu dipertimbangkan untuk di avalist KPTR/KUD.
- d. Pengolahan dan pemasaran hasil merupakan kegiatan terpadu pabrik gula, petani, KPTR/KUD, dengan dukungan bank pemberi kredit dan pembeli gula.
- e. Petani TR menyerahkan tebu yang dihasilkan kepada pabrik gula untuk diolah, kemudian gula milik petani yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bagi hasil penjualan gula sekaligus dikaitkan dengan pengembalian kredit kepada bank pemberi kredit.

4) Pilihan Rasional dan Tindakan Komunikatif

Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional, yakni pendekatan kuat (*strong approach*) dan pendekatan lemah (*weak approach*) (Miller, 1992:24; dalam Yustika, 2008:120).

1. Pendekatan kuat melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan rasional dan tindakan rasional itu sendiri menjadi sebab munculnya analisis pilihan rasional.
2. Pendekatan lemah menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada (*given framework*) karena aktor-aktor rasional berupaya memaksimalkan keuntungan atau meminimalisasikan biaya.

Dengan mencermati deskripsi tersebut, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa rintangan sosial, dan kelembagaan sama-sama eksis dalam pendekatan kuat maupun lemah. Namun, dalam pendekatan kuat diandaikan hambatan sosial dan kelembagaan sebagai pemicu munculnya tindakan rasional. Sebaliknya, dalam pendekatan lemah hambatan sosial dan kelembagaan lahir akibat pertarungan rasional antara individu yang berupaya memaksimalkan laba dan meminimalisasikan ongkos. Tentunya, jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tindakan kolektif dari dua versi teori pilihan rasional tersebut berbeda, tergantung pendekatan mana yang eksis.

Apabila pendekatan kuat yang disepakati sebagai sebab munculnya tindakan rasional, maka sekurangnya terdapat tiga solusi internal yang bisa direkomendasikan, yaitu:

1. Perlunya solusi internal yang kuat (dengan asumsi tidak ada perubahan dalam keyakinan dan preferensi) terhadap problem penunggang bebas. (DeNardo, 1985; dalam Yustika, 2008:120) mengidentifikasi dua kemungkinan:
 - a. Individu terlalu percaya (*overestimate*) terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam tindakan kolektif, seperti ekspektasi bahwa tindakan mereka pasti akan berdampak positif (keuntungan); dan
 - b. Sensitivitas kepuasan dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang membuat kegunaan partisipasi berdampak positif terhadap pencapaian tindakan (*outcome of the action*).

2. Mengabaikan pentingnya isu-isu politik dalam memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi. Sebagai ilustrasi, jika demonstrasi akan dilakukan, maka tidak perlu membahas masalah ideologi ataupun agenda politik yang muluk-muluk, cukup disediakan kopi ataupun makanan yang membuat para demonstran mau terlibat dalam aksi protes tersebut.
3. Taylor (1987) dan Elster (1989) (dalam Yustika, 2008:121) berpendapat, tentang perlunya memunculkan kerjasama kondisional yang saling menguntungkan (*mutual conditional cooperation*). Postulat ini mengemuka berdasarkan teori *prisoner's dilemma* yang sudah cukup mapan.

2.1.2 Biaya transaksi

Bentuk kelembagaan hubungan *principal-agent* muncul sebagai respon terhadap informasi yang sepihak (*asimetric information*) yang akhirnya menimbulkan biaya *agency* (*agency cost*), yang merupakan biaya transaksi yang timbul akibat dari hubungan dimana *agent* bertindak menurut kepentingan *principalnya*. Usaha untuk menurunkan biaya tersebut dengan mempertemukan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai baik oleh *agent* dan *principal*, yang dikombinasikan dengan sistem monitoring yang efektif sehingga dapat mengurangi ketidaksemetrian informasi dan perilaku yang tidak jujur. Menurut Anwar (1995b) masalah penting dari teori hubungan *principal-agent* adalah bagaimana sebaiknya agar pihak *principal* dapat mengamati perilaku *agent*. Apabila *principal* tidak dapat mengamati perilaku *agent*, hal yang harus dilakukan *principal* adalah mengatur struktur insentif kepada pihak *agent*.

Secara umum, elemen kunci untuk meningkatkan hubungan *principal-agent* dalam mengurangi masalah *agency* yang menimbulkan *agency cost* adalah dengan memperkecil kesenjangan informasi dan perilaku *opportunistic* melalui proses negosiasi, monitoring, struktur insentif yang efisien, dan pengembangan aturan-aturan untuk pencapaian tujuan bersama (Mardjana, 1993; dalam Suciati, 2014). Anwar (1995b) menjelaskan dalam bidang pertanian, di wilayah perdesaan bentuk hubungan *principal-agent* pada umumnya merupakan sistem kontrak (usahatani, tenagakerja, lahan dan lain-lain) yang biasa dilakukan masyarakat

perdesaan dengan berbagai bentuk keterkaitan kontrak (*contract interlinkages*) yang umumnya bersifat informal dengan tujuan memperkecil biaya-biaya transaksi. Hubungan ini dilakukan oleh masyarakat perdesaan disebabkan karena sistem pasar yang bersaing di wilayah perdesaan masih sederhana dan belum berkembang, yang disebabkan:

- a. Jeleknya sistem transportasi dan komunikasi sehingga terisolasi.
- b. Langkanya informasi pasar dan mahalnya biaya untuk memperolehnya, dan
- c. Barang-barang input dan output hasil produksi yang dipertukarkan jumlahnya terbatas baik menurut keadaan ruang dan waktu. Sebagai akibatnya keadaan pasar menjadi tersekat-sekat (*segmented market*) kedalam unut-unit kecil yang terbatas pada tingkat komunitas lokal.

Terkait dengan biaya-biaya transaksi, Anwar (1995b) menjelaskan bahwa adanya informasi yang asimetrik akan mendorong individu atau kelompok menentukan pilihan apakah transaksi dilakukan dalam sistem kelembagaan market atau dalam sistem kelembagaan *non-market*, yang tentu saja akan ditentukan oleh nilai dari biaya transaksi. Williamson (1998) menjelaskan ada 2 (dua) dimensi biaya transaksi, yaitu:

1. *Frictionlessness* merupakan biaya yang berhubungan dengan friksi secara fisik dari barang atau komoditas yang ditransaksikan.
2. *Explication* menyangkut biaya yang berhubungan dengan *enforcement* dari *property rights* dalam suatu kontrak.

Teori biaya transaksi berasal dari pendekatan Kelembagaan Ekonomi Baru dan berfokus pada tata kelola kelembagaan (*institutions of governance*). Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa lembaga yang meminimalkan pengaturan biaya transaksi dapat berubah dan berkembang (Williamson, 1981). Biaya transaksi disebut sebagai biaya tersembunyi (*hidden cost*), terkadang merupakan biaya yang dapat diamati dan tidak dapat diamati terkait dengan pertukaran barang dan jasa. Biaya ini timbul karena friksi yang terlibat dalam proses pertukaran karena memerlukan transfer dan penegakan *property right*.

Biaya transaksi dapat dikategorikan dalam biaya transaksi tetap dan variabel. Biaya transaksi tetap bersifat tetap dengan volume output yang

diperdagangkan dan mempengaruhi keputusan partisipasi petani dalam pasar.

Biaya transaksi yang termasuk biaya tetap yaitu:

- a. Mencari mitra dagang dengan siapa untuk pertukaran atau mencari pasar.
- b. Negosiasi dan tawar-menawar khususnya ketika ada informasi yang tidak sempurna mengenai harga.
- c. Skrining, penegakan kontrak dan pengawasan.

Biaya transaksi variabel dapat berupa biaya per unit dalam mengakses pasar yang besarnya bervariasi dengan volume yang diperdagangkan dan dapat mempengaruhi keputusan partisipasi pasar serta kuantitas yang diperdagangkan. Ini termasuk biaya yang terkait dengan mentransfer output yang diperdagangkan seperti biaya transportasi dan waktu yang dihabiskan untuk mengirimkan produk ke pasar. Biaya ini sebagian besar tidak teramati atau tidak dapat dengan mudah direkam dalam survei. Pada dasarnya, transaksi variabel biaya menaikkan harga riil komoditas yang dibeli dan menurunkan harga riil yang diterima untuk komoditas yang dijual.

Secara rinci sebagaimana mengemukakan biaya transaksi meliputi biaya kontrak, biaya monitoring, biaya *enforcement*, biaya pengambilan keputusan, biaya informasi, biaya negosiasi, biaya koordinasi dan biaya *opportunisme*. Biaya informasi bersifat *ex-ante* pada suatu pertukaran termasuk didalamnya biaya untuk memperoleh harga, kualitas produk, serta biaya menentukan mitra dalam pertukaran yang sering menjadi persoalan buruknya pilihan (*adverse selection*). Biaya negosiasi meliputi biaya untuk melakukan transaksi secara fisik termasuk biaya komisi, biaya negosiasi syarat-syarat kontrak pertukaran dan biaya membuat kontrak formal. Biaya monitoring timbul secara *ex-post* dari suatu pertukaran meliputi biaya pemantauan pelaksanaan syarat-syarat kontrak seperti standar kualitas produk dan cara pembayaran, akibatnya muncul persoalan bahaya moral (*moral hazard*). Disimpulkan bahwa biaya *agency* secara implisit merupakan bagian atau komponen biaya transaksi.

Secara umum, penentuan pilihan suatu transaksi ekonomi akan dilakukan melalui sistem pasar (*spot market*) atau melalui sistem organisasi non-pasar dengan bentuk institusi lain, ditentukan oleh pertimbangan tingginya biaya

transaksi ini. Tekanan dalam analisis ekonomi biaya transaksi (*economics of transaction cost*), dimana satuan dasar analisisnya terletak pada proses transaksi itu sendiri. Apakah suatu transaksi ekonomi akan dilaksanakan di dalam sistem pasar atau bentuk organisasi lainnya, tergantung kepada besarnya biaya-biaya transaksi yang terjadi; yang pada prinsip dasar pilihannya akan diambil oleh penentu atau pengambil keputusan yang akan mencoba berusaha untuk menekan biaya-biaya transaksi ini sampai ke tingkat yang minimum (Anwar, 1995b).

Biaya transaksi menurut Arrow (1969) didefinisikan sebagai biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi (*the cost of running the economic system*). Seperti telah disinggung di atas, biaya-biaya transaksi tersebut dibedakan dari biaya-biaya produksi, yaitu biaya-biaya produksi yang termasuk dalam pemikiran dan analisis ekonomi dari neoklasik. Biaya-biaya transaksi dapat diinterpretasikan yang merupakan kesetaraan ekonomi (*economic equivalent*) sebagai halnya yang terjadi pada hambatan/tahanan (*friction*) yang terjadi dalam sistem fisik (*physical system*).

Biaya transaksi untuk melaksanakan transaksi ekonomi tertentu akan menjadi rendah atau tinggi, maka hal ini akan tergantung kepada dimensi kritikal (*critical dimension*) yang menentukan bentuk-bentuk dan besarnya biaya transaksi yang bersangkutan. Dimensi kritikal yang menentukan pilihan organisasi tersebut meliputi apa yang disebut :

- a. Kekhasan dari asset (*asset specificity*).
- b. Ketidakpastian dan kompleksitas menyangkut keadaan yang dihadapinya (*Uncertainty and Complexity*) dan
- c. Frekuensi dari terjadinya transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan.

Menurut Dietrich (1994) (dalam Suciati, 2014) biaya transaksi yang terjadi dalam kontrak antara perusahaan agribisnis dan petani bisa dibedakan menjadi empat kelompok yaitu :

1. Biaya perencanaan, negosiasi dan implementasi kontrak.
2. Biaya-biaya yang terjadi akibat penyimpangan pelaksanaan kontrak.
3. Biaya operasi yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kontrak, dan
4. Biaya ikatan agar masing-masing mematuhi kontrak.

Perusahaan akan melakukan kontrak apabila biaya-biaya transaksi tersebut lebih rendah dari pada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suplai di pasar biasa atau melalui model perkebunan. Selain mempertimbangkan biaya transaksi, untuk mencari mitra usaha petani kecil, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya produksi. Menggunakan teori yang sama, pihak petani kecil bisa memperoleh keuntungan pengurangan biaya-biaya seperti :

- a. Masuk ke pasar.
- b. Mendapatkan kredit.
- c. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam keluarga.
- d. Menghadapi resiko, dan
- e. Memperoleh informasi pasar dan teknologi.

Oleh karena itu, kontrak harus menarik bagi petani kecil yang tidak memiliki akses kredit, pasar tenaga kerja dan tidak bisa memenuhi kondisi skala ekonomi dalam mendapatkan informasi dan akses pasar. Petani-petani kecil tersebut juga penting bagi perusahaan karena rendahnya biaya produksi, terutama dalam menghasilkan produk-produk bernilai tinggi yang memerlukan tenaga kerja intensif.

Pada dasarnya setiap hubungan transaksi mengandung tiga komponen ekonomi mendasar yaitu alokasi nilai (*the allocation of value*) atau distribusi keuntungan dari pertukaran, alokasi ketidakpastian (*the allocation of uncertainty*) dan resiko-resiko yang terkait dan *the allocation of property right* akan membatasi pengambilan keputusan dalam suatu hubungan. Permasalahan penting yang kemudian muncul adalah tidak selalu sebuah kontrak tercipta dengan persyaratan yang lengkap (*complete contract*), ditambah kehadiran *opportunisme* sehingga biaya transaksi selalu muncul (Williamson, 1998; dalam Manziati 2011). Secara umum menurut Coase R (1937) jika *property right* sulit ditegakkan dan pada kondisi biaya transaksi positif, maka persetujuan kontrak melalui pemahaman masalah *agency* akan mengurangi aspek ketidak lengkapan kontrak. Melalui kontrak yang optimal, insentif yang diberikan akan mengurangi risiko.

1) Determinan dan Variabel Biaya Transaksi

Isu utama dalam biaya transaksi adalah pengukuran. Berbagai studi empiris telah dilakukan, namun beberapa kerancuan definisi masih ada dan hasil yang diperoleh tidak memuaskan semua pihak. Joskow mengikuti pendekatan yang menggambarkan pentingnya kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangements*) dalam penciptaan biaya transaksi, yang didasarkan pengalaman pembangkit listrik (Furubotn dan Richter, 1991:10-11; dalam Yustika, 2006). Deskripsi pengukuran biaya transaksi merupakan masalah pelik sehingga diperlukan pemahaman yang sama mengenai definisi, determinan, dan variabel.

Collins dan Fabozzi (1991) (dalam Yustika, 2006:128) menjelaskan, konsep biaya transaksi yang kompleks diderivasi dalam bentuk variabel - variabel yang mudah untuk diukur melalui formulasi biaya transaksi sebagai berikut:

- a. Biaya transaksi = biaya tetap (BT) + biaya variabel (BV).
- b. Biaya tetap = komisi + *transfer fees* + pajak.
- c. Biaya variabel = biaya eksekusi + biaya oportunitas.
- d. Biaya eksekusi = *price impact* + *market timing costs*.
- e. Biaya oportunitas = hasil diinginkan - pendapatan aktual - biaya eksekusi - BT.

Keterkaitan biaya transaksi dengan kelembagaan mempunyai makna strategis sebagai indikator tingkat efisiensi. Indikator efisiensi kelembagaan diamati dari tinggi rendahnya biaya transaksi yang muncul dari kegiatan (transaksi) ekonomi. Semakin rendah biaya transaksi menunjukkan kelembagaan yang efisien, demikian sebaliknya (Yeager, 1999 dalam Yustika, 2006:259).

2) Hubungan produksi dan biaya transaksi

Hubungan antara produksi dan biaya dibedakan menjadi dua konsep menurut periode waktunya (Samuelson dan Nordhaus, 2003). Dalam jangka pendek (*short run*), perusahaan akan selalu menyesuaikan input-input variabelnya, sedangkan input yang bersifat tetap tidak dapat diubah. Sehingga dalam jangka pendek biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku adalah biaya variabel, sedangkan biaya modal adalah biaya tetap. Dalam jangka panjang (*long run*), semua input

dapat disesuaikan, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Oleh karena itu semua biaya dalam jangka panjang termasuk sebagai biaya variabel.

Biaya total produksi dalam ilmu akuntansi merupakan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari biaya produksi dan biaya lain-lain. Biaya produksi adalah biaya yang langsung berkaitan dengan proses produksi, misal biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya modal. Sedangkan biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi, tapi tidak langsung berhubungan dengan proses produksi, misal biaya pajak. Biaya lain-lain ini seharusnya dimasukkan ke dalam penentuan harga suatu barang.

Biaya lain-lain dalam ilmu akuntansi tidak lain adalah biaya transaksi. North (1993) memberikan pernyataan, bahwa di dunia ini terdapat *incomplete information* dan *limited mental capacity* dari proses informasi. Institusi digunakan sebagai alat untuk membatasi interaksi manusia dalam mengadakan pertukaran sehingga ketidakpastian dalam *human exchange* dapat diminimalkan. North (1993) mengatakan bahwa “*a world ideas and ideologies play a major role in choices and transaction costs results in imperfect markets*”.

2.1.3 Kemitraan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun (1997 dalam pasal 1) menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Salah satu alternatif usaha untuk mengatasi kendala dalam usahatani dapat dilakukan melalui sistem kemitraan. Permasalahan klasik yang dihadapi petani tebu seperti pemodalan, manajemen dan pemasaran hasil, dengan kemitraan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani disamping itu juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan mitra (Widaningrum, 2007).

Menurut Hendrojogi (1999) pola kerjasama atau kemitraan usaha antara pengusaha besar dan koperasi serta pengusaha kecil haruslah mengacu pada

memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kemitraan usaha. Kemitraan strategis memang memiliki potensi untuk membuat rekan kemitraan lebih kuat dan stabil, namun kemitraan sering pula membawa kekecewaan. Dua faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari hubungan kerjasama ini yaitu: tujuan yang ditetapkan bagi kemitraan tersebut dan perilaku atau sifat dan sikap dari pihak yang turut serta dalam kemitraan.

Menurut Sulistyani (2004) kemitraan merupakan pemecah masalah untuk meningkatkan kesempatan petani kecil dalam perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan. Tujuan kemitraan antar lain adalah untuk meningkatkan pendapatan, usaha, jaminan suplai jumlah, dan kualitas produksi. Pelaku kemitraan meliputi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian.

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan strategi bisnis yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis, dalam konteks ini, pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut, harus memiliki dasar - dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar - dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan (Soemardjo, 2004). Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem pola kemitraan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi perusahaan

1. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, maka efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya keuntungan perusahaan dapat meningkat.
2. Tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari sumber petani mitra usahanya.

b. Manfaat bagi petani

1. Adanya jaminan pemasaran hasil yang pasti dengan harga yang layak sesuai dengan kepastian.
2. Dalam hal tertentu petani dapat terbantu dari segi permodalan, teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha tani tersebut.

c. Manfaat bagi pemerintah

1. Meningkatkan penerimaan negara sebagai dampak dari peningkatan pendapatan baik dari usaha tani maupun dari perusahaan pertanian.
2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dipedesaan dengan berkembangnya usaha tani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustri.

1) Konsep kemitraan

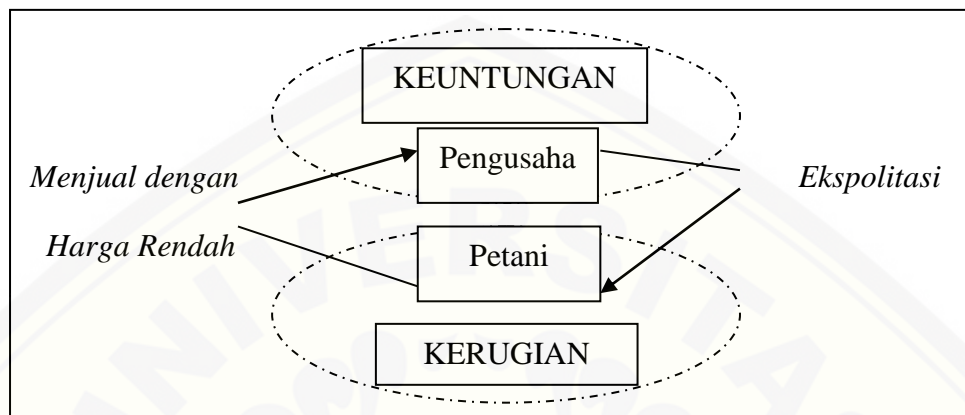
Konsep kemitraan yang banyak dilakukan di Indonesia terdiri dari dua tipe, yaitu tipe dipersial dan tipe sinergis (Soemardjo, 2004).

1. Tipe Dipersial

Dipersial berasal dari kata asal dipersi yang artinya terbesar. Dalam hal ini tipe dipersial dapat diartikan sebagai pola hubungan antar-pelaku usaha yang satu sama lain memiliki ikatan formal yang kuat. Tipe dipersial dicirikan tidak ada hubungan organisasi fungsional antara setiap tingkatan usaha pertanian hulu dan hilir. Jaringan agribisnis hanya terikat pada mekanisme pasar, sedangkan antar-pelakunya bersifat tidak langsung dan impersonal. Sehingga setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam kondisi tersebut, pelaku tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka saling membutuhkan. Bahkan salah satu pihak, terutama pihak investor, cenderung eksploitatif sehingga menjurus pada kematian usaha bersama.



Pada kemitraan tipe dipersial, pihak pengusaha lebih kuat dibandingkan produsen. Pihak pengusaha ini sangat berperan dalam berhubungan dengan produsen yang lemah. Akan tetapi, hubungan yang terjalin di antara kedua belah pihak tidak sinergis dan tidak berkesinambungan karena tidak bersifat kemitraan. Kondisi seperti itu menimbulkan kesenjangan dalam sistem bisnis hulu dan hilir. Kesenjangan yang terjadi berupa informasi tentang mutu, harga, teknologi, dan

akses permodalan. Dengan demikian pemodal kuat yang umumnya berwawasan luas, lebih berpendidikan, dan telah berperan di subsistem hilir menjadi diuntungkan oleh berbagai kelemahan pengusaha kecil sebagai produsen.



Gambar 2.1 Kondisi Kemitraan Tipe Dipersial (Sumber: Affan, 2014)

Keterangan :

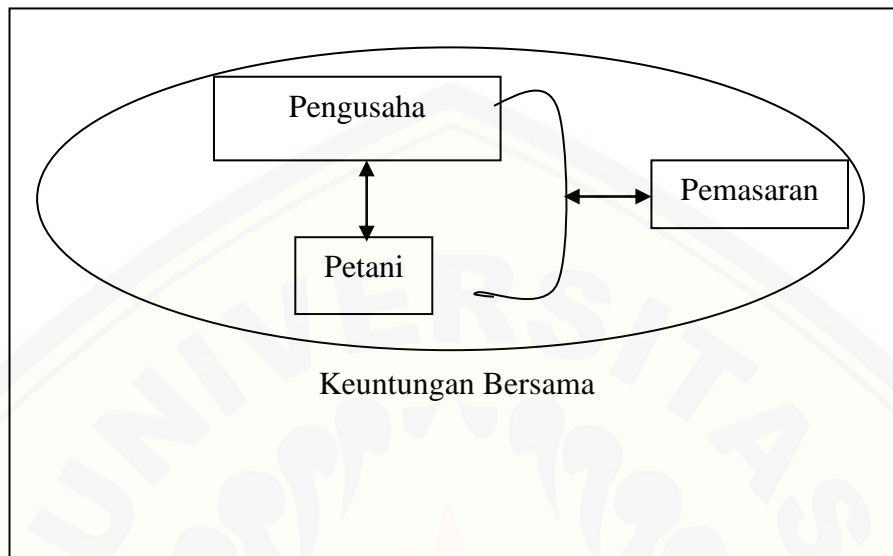
-  Kondisi yang dialami
-  Langkah yang dilakukan

2. Tipe Sinergi dan Saling Menguntungkan

Tipe ini berbasis pada kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung pada masing-masing pihak yang bermitra. Sistem kemitraan jenis ini sudah mulai banyak ditemukan di daerah pedalaman (*hinterland*) kota-kota besar dan kota menengah. Contoh kemitraan sistem ini adalah kemitraan petani tebu, karena telah terbukti menunjukkan sinergi kerjasama usaha yang saling menguntungkan dan saling memperkuat serta menjadikan kerjasama bisnis mereka berkesinambungan. Sinergi yang dimaksud saling menguntungkan di sini diantaranya dalam bentuk petani menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan pihak eksportir menyediakan modal, bimbingan teknis, dan atau penjaminan pasar.

Konsep kemitraan agribisnis menjadikan salah satu pilihan yang prospektif bagi pengembangan iklim bisnis yang sehat di Indonesia pada masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terjadi jika konsep kemitraan yang dijalankan benar-

benar dapat menjembatani kesenjangan antar-subsistem dalam sistem hulu-hilir (produsen-industri pengolahan-pemasaran) maupun hulu-hulu (sesama produsen).



Gambar 2.2 Kondisi Kemitraan Tipe Sinergis (Sumber: Affan, 2014)

Keterangan :

↔ Fungsi timbal balik

2) Bentuk kemitraan

Dalam sistem agribisnis di Indonesia, terdapat 5 (lima) bentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha besar (Soemardjo, 2004):

1. Pola Kemitraan Inti-Plasma

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Keunggulan sistem inti-plasma:

- a. Terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan Usaha kecil sebagai plasma mendapatkan pinjaman permodalan, pembinaan teknologi dan manajemen, sarana produksi, pengolahan serta pemasaran hasil dari

perusahaan mitra. Perusahaan inti memperoleh standar mutu bahan baku industri yang lebih terjamin dan berkesinambungan.

- b. Terciptanya peningkatan usaha Usaha kecil plasma menjadi lebih ekonomis dan efisien karena adanya pembinaan dari perusahaan inti. Kemampuan pengusahaan inti dan kawasan pasar perusahaan meningkat karena dapat mengembangkan komoditas sehingga barang produksi yang dihasilkan mempunyai keunggulan dan lebih mampu bersaing pada pasar yang lebih luas, baik pasar nasional, regional, maupun internasional.
- c. Berkembangnya kemitraan inti-plasma mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan kemitraan sebagai media pemerataan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial antar daerah.

Kelemahan sistem plasma:

- a. Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar.
- b. Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma.
- c. Belum ada kontak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti memperlakukan harga komoditas plasma.

2. Pola Kemitraan Subkontrak

Pola kemitraan subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Keunggulan pola kemitraan subkontrak:

Kemitraan ini ditandai dengan adanya kesepakatan mengenai kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Pola subkontrak sangat bermanfaat bagi terciptanya alih teknologi, modal, keterampilan dan produktivitas, serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra.

Kelemahan pola kemitraan subkontrak:

- a. Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran.
- b. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak.
- c. Kontrol kualitas produk ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat.

3. Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Keuntungan berasal dari margin harga dan jaminan harga produk yang diperjual-belikan, serta kualitas produk sesuai dengan kesepakatan pihak yang bermitra.

Keunggulan pola kemitraan dagang umum:

Kelompok mitra atau koperasi tani berperan sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Sementara itu, perusahaan mitra memasarkan produk kelompok mitra ke konsumen. Kondisi tersebut menguntungkan pihak kelompok mitra karena tidak perlu bersusah payah memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen.

Kelemahan pola kemitraan dagang umum:

- a. Dalam prakteknya, harga dan volume produknya sering ditentukan secara sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan kelompok mitra.
- b. Sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi.

4. Pola Kemitraan Keagenan

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil. Pihak perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra.

Perusahaan besar/menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang dan jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban

memasarkan produk atau jasa. Di antara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. Keuntungan usaha kecil (kelompok mitra) dari pola kemitraan ini bersumber dari komisi oleh pengusaha mitra sesuai dengan kesepakatan.

Keunggulan pola kemitraan keagenan:

Pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh pengusaha kecil yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Berbeda dengan pola dagang umum yang justru perusahaan besarlah yang kadang-kadang lebih banyak memperoleh keuntungan dan kelompok mitra haruslah bermodal kuat.

Kelemahan pola kemitraan keagenan:

- a. Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak sehingga harganya menjadi lebih tinggi di tingkat konsumen.
 - b. Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.
5. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola kemitraan KOA merupakan hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. KOA telah dilakukan pada usaha perkebunan, seperti perkebunan tebu, tembakau, sayuran, dan usaha perikanan tambak. Dalam KOA terdapat kesepakatan tentang pembagian hasil dan resiko dalam usaha komoditas pertanian yang dimitrakan.

Keunggulan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis:

Keunggulan kemitraan ini sama dengan keunggulan sistem inti-plasma. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis ini paling banyak ditemukan

pada masyarakat pedesaan, antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil.

Kelemahan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis:

- a. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya.
- b. Perusahaan mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya.
- c. Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahan di atas.

Faktor-faktor pendorong terjalannya kemitraan antara petani dengan pengusaha dari sisi petani adalah sebagai berikut (Basoenondo, dalam Wulandari, 2004):

- a. Adanya jaminan modal Petani umumnya mau menjalin kerjasama atau bermitra dengan adanya jaminan modal. Asumsi yang ada, dengan adanya modal petani dapat dengan mudah mengerjakan lahannya, karena modal merupakan faktor utama bagi petani sebagai sumber dana.
- b. Ketersediaan pupuk petani menganggap tersedianya pupuk akan memudahkan petani melakukan kegiatan usahatani, dan penggunaan pupuk akan meningkatkan kualitas produk, tentu saja harus disertai bimbingan penggunaan pupuk yang tepat.
- c. Anjuran penanaman varietas atau jenis tertentu sesuai dengan yang diinginkan pabrikan. Diasumsikan jika pabrikan memberikan anjuran varietas tertentu maka pada saat panen, maka pabrikan akan membeli produk petani.
- d. Adanya jaminan kepastian pasar asumsi yang ada, jika pabrikan memberikan bantuan modal atau memberikan kepercayaan kepada petani dengan memberikan bantuan modal, berarti pabrikan akan menerima produk petani.
- e. Adanya bimbingan teknis budidaya diasumsikan jika pengusaha atau pabrikan memberikan bantuan modal, maka tidak mungkin pabrikan akan membiarkan petani berusahatani tanpa bimbingan teknis dari pihak pabrikan. Bimbingan teknis dilakukan untuk mengurangi resiko kegagalan dari pihak petani. Resiko

kegagalan ini dapat berdampak pada resiko pengembalian modal yang cukup kecil. Bimbingan teknis akan membuat petani lebih terarah dalam melakukan kegiatan usahatani dan merasa aman terhadap terjadinya cacat fisik sejak tanam. Misal warna tidak sesuai (*nemor*), berlubang karena serangan hama penyakit, dan lainnya, sehingga dapat diantisipasi sejak dini, dimana kegiatan antisipasi ini dilakukan dari kedua belah pihak yang bermitra.

- f. Adanya bimbingan teknis pasca panen/pengeringan diasumsikan bimbingan teknis pasca panen akan mengurangi cacat fisik.
- g. Adanya keterlibatan pemerintah dalam kerjasama antara petani dengan pengusaha, pemerintah dapat melakukan pembinaan kepada petani, sehingga petani mendapatkan 2 (dua) sumber informasi pasar yang dapat menampung hasil produksinya. Jika pada nantinya terjadi permasalahan maka pemerintah dapat menjadi penengah yang dapat menghubungkan petani dengan pengusaha, sehingga posisi lemah petani dapat diperkuat dengan posisi pemerintah.
- h. Keterbukaan pihak pabrikan yang mengajak bermitra adalah pabrikan yang transparan, baik pada masalah jumlah/kuantitas produk yang akan dibeli, maupun kualitas dan harga yang dikehendaki pabrikan.
- i. Penanggung resiko diasumsikan petani akan mau bermitra jika pihak pabrikan yang memberikan bantuan berupa modal maupun sarana produksi lain, akan memberikan solusi jika terjadi hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Misalnya datangnya hujan lebih awal yang disertai badai, sehingga tebu petani mengalami kerusakan. Keadaan ini tidak akan menyebabkan pabrikan lepas tangan begitu saja meninggalkan petani, akan tetapi dapat memberikan solusi yang baik walaupun secara teknis sangat sulit dilakukan.

3) Proses Pengembangan Kemitraan

Menurut Hafsah (2002), kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dipakai secara beraturan dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target sasaran

tercapai. Adapun rangkaian proses pembentukan kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Memulai membangun hubungan dengan calon mitra langkah awal dalam proses kemitraan adalah mengenal calon mitra. Pengenalan calon mitra ini merupakan awal keberhasilan dalam proses membangun kemitraan selanjutnya. Memilih mitra yang tepat memerlukan waktu karena harus benar-benar diyakini, maka informasi yang dikumpulkan harus lengkap.
- b. Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra. Kondisi bisnis calon mitra harus benar-benar diperhatikan terutama kemampuan dalam manajemen, penguasaan pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya manusianya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya.
- c. Mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis. Strategi yang direncanakan bersama meliputi strategi dalam pemasaran, distribusi, operasional dan informasi. Strategi disusun berdasarkan keunggulan dan kelemahan bisnis dari pihak yang bermitra.
- d. Mengembangkan program. Setelah informasi dikumpulkan kemudian dikembangkan menjadi suatu rencana yang taktis dan strategi yang akan diimplementasikan. Termasuk didalamnya menentukan atau membatasi nilai tambah yang ingin dicapai.
- e. Memulai pelaksanaan kemitraan berdasarkan ketentuan yang disepakati. Pada tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengecek kemajuan-kemajuan yang dialami.
- f. Memonitor dan mengevaluasi, perkembangan pelaksanaan perlu dimonitor terus-menerus agar target yang ingin dicapai benar-benar dapat menjadi kenyataan. Di samping itu perlu terus dievaluasi pelaksanaannya untuk perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.

2.1.4 Kontrak

1) Kontrak Usaha Tani

Kontrak Usahatani merupakan bagian yang penting pada suatu kegiatan usahatani, dikarenakan sebagai wadah bagi para petani untuk menampung hasil panen. Menurut Agustina (2011) dalam bukunya, pembangunan kawasan usaha tani melibatkan 3 komponen yang saling berinteraksi :

1. faktor penataan ruang/wilayah dengan pemanfaatan secara berkesinambungan.
2. faktor sumber daya manusia
3. pola pengembangan usaha pada satu kawasan.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi membangun kesejahteraan ekonomi yang kuat bagi masyarakat.

2) Tipe Kontrak Usaha Tani

Menurut Furubotn dan Richter (2002) tipe kontrak dibagi dalam tiga jenis:

1. Teori kontrak agen (*agency-contract theory*) yaitu kesepakatan yang ditegakkan secara hukum antara prinsipal dengan agen.
2. Teori kesepakatan otomatis (*self-enforcing agreement theory*) yang bermakna bahwa tidak seluruh hubungan atau pertukaran dapat ditegakkan secara hukum, karena sistem hukum mungkin tidak sempurna atau informasi yang relevan tidak dapat diverifikasi oleh pengadilan. Dalam hal ini, kontrak berisi kesepakatan yang dapat ditegakkan secara otomatis. Model seperti ini disinonimkan dengan istilah kontrak implisit yang mencakup norma-norma perilaku daripada pembagian risiko (*risk sharing*).
3. Teori kontrak - relasional (*relational-contract theory*) diartikan sebagai kontrak yang tidak dapat menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di masa lalu, saat ini dan ekspektasi terhadap hubungan di masa depan di antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak (Macneil, 1974; dalam Furubotn dan Richter, 2002). Kontrak relasional mengacu pada derajat bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan. Model seperti ini mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi modern.

Penyelesaian dalam kontrak ini dicapai melalui keseimbangan kerja sama dan pemaksaan, serta komunikasi dan strategi.

3) Karakteristik Kontrak

Biaya kontrak seharusnya dimasukkan ke dalam penentuan harga seperti yang dikemukakan oleh Ronald Coase bahwa:

“The most obvious cost of ‘organizing’ production through the price mechanism is that of the discovering what the relevant prices are. This cost may be reduced but it will not be eliminated The cost of negotiating and concluding a separate contract of each exchange transaction which takes place on a market must also taken into account.” (Coase, 1937:389)

Kontrak sendiri memiliki karakteristik yaitu kontrak muncul sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha (pelaku bisnis). Keterbatasan membuat pengusaha (pelaku bisnis) membutuhkan faktor-faktor produksi lain yang tidak dapat dihasilkan oleh si pengusaha (pelaku bisnis). Pengusaha (pelaku bisnis), dengan keterbatasannya, akan berusaha mengarahkan penggunaan faktor produksi yang ia peroleh dari pihak lain (Coase, 1937).

Setiap pengusaha (pelaku bisnis) akan membuat peramalan terhadap kerja sama yang ia lakukan dengan pihak lain. Peramalan terhadap apa yang akan terjadi pada masa depan kenyataannya sulit dilakukan. Kontrak dilakukan oleh pengusaha (pelaku bisnis) sebagai usaha dalam mengurangi risiko yang mungkin akan muncul di masa akan datang. Biasanya para pengusaha (pelaku bisnis) yang bertindak sebagai pembeli lebih suka untuk membuat kontrak dalam jangka panjang. Pihak yang menjual barang atau jasa akan lebih memilih untuk melakukan kontrak dalam jangka pendek kepada pembelinya. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari adanya kesulitan dalam meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan sehingga pihak penjual ini tidak mau mengambil risiko dengan penjualan melalui kontrak.

4) Informasi Asimetris

Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan (*reciprocal action*) atau pembayaran. Dalam kenyataannya, kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan (Klein, 1980:356-358; dalam Yustika, 2008:105).

1. ketidakpastian (*uncertainty*) menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya contingencies, sehingga hal itu berimplikasi kepada munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalam rangka merespons seluruh kemungkinan ketidakpastian tersebut.
2. kinerja kontrak khusus (*particular contractual performance*), misalnya menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit (*complex task*), mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran.

Oleh karena itu, adanya pelanggaran kontrak sering kali menyulitkan pihak ketiga (pengadilan) untuk memberikan bukti sebagai dasar keputusan. Munculnya faktor ketidakpastian sebetulnya dapat ditelusuri dari realitas adanya informasi asimetris (*asymmetric information*) dalam kegiatan ekonomi. Secara teknis, informasi asimetris tidak lain merupakan kondisi di mana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan (*unequal knowledge*) yang dialami oleh pelaku-pelaku (*parties*) untuk melakukan transaksi di pasar. Sebagai contoh, pembeli dan penjual memiliki informasi yang tidak sama tentang harga, kualitas, atau aspek lainnya tentang barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan (McConnel dan Brue, 2005:572; dalam Yustika, 2008:105). Di sinilah dibutuhkan suatu kontrak yang lengkap sehingga eksistensi informasi asimetris tadi dapat dikurangi atau direduksi.

Informasi asimetris yang terjadi di antara pelaku transaksi dapat direduksi melalui kelembagaan pasar perantara (*intermediary market institutions*), yang sering disebut dengan kelembagaan penghalang (*counteracting institutions*). Contoh yang bagus untuk menunjukkan kelembagaan dimaksud adalah jaminan/garansi (*guarantees*) atas barang. Garansi memberikan pembeli

kecukupan waktu untuk memperoleh informasi yang sama tentang barang sebaik pengetahuannya yang dimiliki oleh penjual. Di luar garansi, instrumen kelembagaan lain adalah merek (brand-names), kongsi (chains), dan waralaba (franchise) sebagai mekanisme jaminan bagi pembeli, setidaknya menyangkut kualitas produk (Auronen, 2003:9; dalam Yustika, 2008:106).

5) Mekanisme Penegakan Kontrak dan Instrumen Ekstralegal

Faktor perbedaan jenis kontrak (Menard, 2000:236; dalam Yustika, 2008:110).

- a. Jangka waktu (duration) dari kontrak. Hampir semua studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa jangka waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi. Oleh karena itu, jangka waktu sekaligus juga menggambarkan komitmen (signal commitment) dari para mitra.
- b. Derajat kelengkapan (degree of completeness), yang mencakup variabel-variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan (delay), dan penalti. Beberapa studi menunjukkan bahwa derajat kelengkapan kontrak meningkat seiring dengan spesifikasi aset dan menurun bersamaan dengan ketidakpastian.
- c. Kontrak biasanya bersinggungan dengan insentif. Mekanisme tersebut antara lain adalah sistem tingkat yang tetap (piece-rate systems), upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik, dan sewa yang dibagi di antara mitra yang bergabung dalam proyek.
- d. Prosedur penegakan (enforcement procedures) yang berlaku. Kontrak berhubungan dengan mitra untuk tujuan yang saling menguntungkan (mutual advantage), tetapi pada tempo yang bersamaan kontrak juga menyimpan risiko kerugian (disadvantage) melalui sikap oportunistik (opportunism): entah disebabkan oleh kontrak yang tidak lengkap maupun kondisi pelaksanaan yang berbeda dengan situasi pada saat negosiasi, atau bisa karena keduanya.

Isu yang utama adalah mencari kesepakatan yang optimal, yakni kontrak didesain sebegitu rupa sehingga pelaku (*agents*) memiliki insentif yang memadai untuk mematuhi atas kontrak yang sudah dimufakati. Kontrak semacam ini

semestinya harus dapat memaksakan sendiri (*self-enforcing*), dalam arti implementasinya tergantung kepada mekanisme otomatis (*built-in mechanism*).

2.1.5 Pengertian Tebu Rakyat Intensifikasi

Pengertian Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) menurut Inpres No 9 tahun 1975 yaitu langkah-langkah yang bertujuan untuk mengalihkan usahatani tanaman tebu untuk produksi gula diatas tanah sewa, kearah tanaman tebu tanpa mengabaikan upaya peningkatan tanaman tebu rakyat tersebut dilakukan secara bertahap.

Menurut Inpres No 9 tahun 1975 tersebut pada dasarnya maksud yang terkandung antara lain :

- a. Menghasilkan pengusaha tanaman tebu dari sistem sewa tanah oleh pabrik gula menjadi Tebu Rakyat yang diusahakan petani diatas lahan/tanah miik sendiri.
- b. Meningkatkan produksi gula nasional dan pendapatan petani tebu melalui pola TRI.
- c. Mengusahakan pabrik gula dalam fungsinya dan peranan sebagai Pimpinan Kerja Operasional Lapangan (PKOL) guna melaksanakan alih teknologi budidaya tebu petani kepada petani.
- d. Mengikut sertakan Koperasi Unit Desa KUD/KPTR dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani TRI agar produksi gula dan pendapatannya meningkat.

2.2 Determinan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat (Definisi Variabel)

2.2.1 Pengertian Usahatani

Ilmu usaha tani merupakan proses menentukan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi pertanian untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang maksimal (Suratiyah, 2006).

Usahatani merupakan kegiatan bercocok tanam dengan mengalokasikan sumber-sumber daya seperti tanah, lahan, tenaga kerja, modal, dan air untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini seperti yang telah diungkapkan Soekartawi (2002) bahwa usahatani adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Usahatani memiliki empat unsur pokok (Hermanto, 1996). Unsur yang pertama adalah lahan. Lahan berperan sebagai faktor produksi yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, luas lahan, lokasi, intensifikasi, dan fasilitas. Unsur kedua adalah tenaga kerja yang dapat berasal dari orang lain atau dari anggota keluarga sendiri. Unsur ketiga adalah modal yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kekayaan usahatani. Unsur keempat adalah pengelolaan dalam menentukan, mengkoordinasi, dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan.

2.2.2 Faktor Produksi Usahatani

Di dalam proses produksi usahatani untuk menghasilkan suatu produk dapat dipengaruhi oleh satu atau beberapa faktor. Adapun faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti modal, tanah, tenaga kerja, bibit, pupuk dan lainnya. Faktor faktor ini dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan petani (Prawirokusumo, 1990).

2.2.3 Pengertian Luas Lahan

Tanah merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian karena tanah merupakan tempat dimana usahatani dapat dilakukan dan tempat hasil produksi dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh tanaman. Tanah memiliki sifat tidak sama dengan faktor produksi lain yaitu luas relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga sifatnya langka. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan ditanami maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Ukuran lahan pertanian dapat dinyatakan dengan hektar (Mubyarto, 1989: 89).

2.2.4 Pengertian Umur

Penduduk berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 22-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah dan oleh sebab itu tingkat partisipasi angkatan kerja relatif besar. Sedangkan penduduk diatas usia 55 tahun kemampuan bekerja sudah menurun, dan tingkat partisipasi angkatan kerja umumnya rendah (Sumarsono, 2003; dalam Setiawan, 2010).

2.2.5 Pengertian Jarak Tempat Tinggal

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud jarak adalah ruang sela yang menunjukkan panjang luasnya antara satu titik ketitik yang lain. Berdasarkan definisi tersebut berarti jauh dekatnya ruang sela yang harus ditempuh oleh petani. Tempat tinggal adalah keberadaan petani bernaung atau tinggal di sebuah rumah. Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal bersama keluarga. Jadi tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini berarti rumah yang ditempati petani sehari-hari.

2.2.6 Biaya Transaksi

Biaya transaksi ialah biaya yang dikeluarkan diluar proses produksi (Suciati, 2014), yaitu terdiri dari:

1. Biaya informasi
2. Biaya pengambilan keputusan
3. Biaya operasional

Kategori pertama dan kedua merupakan biaya transaksi sebelum kegiatan kontrak (*ex-ante*), sedangkan katagori ketiga merupakan biaya transaksi sesudah kegiatan kegiatan (*ex-post*). Analisis biaya transaksi ekonomi penerapan kemitraan usaha tani tebu rakyat dilakukan untuk mengetahui struktur biaya yang dibutuhkan dalam penerapan usaha tani tebu.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya digunakan sebagai referensi dan berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Menurut Sriati, *et al.* (2006), mengenai pola kemitraan antara petani tebu rakyat dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang di Lampung Utara. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membandingkan pola kemitraan petani anggota TRK (Tebu Rakyat Kredit) dan petani anggota TRB (Tebu Rakyat Bebas) dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang di Desa Karang Rejo. Selain itu tujuan dari penelitian adalah menganalisis faktor-faktor (modal, luas lahan, akses ke lahan, dan pengalaman) yang mempengaruhi keputusan petani menjadi anggota TRK atau TRB di Desa Karang Rejo, dan membandingkan pendapatan usahatani menjadi anggota TRK dan TRB di Desa Karang Rejo, Lampung Utara.

Metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan Sriati, dkk menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berupa tabulasi dan deskriptif untuk membandingkan hubungan kemitraan antara petani anggota TRK dan petani anggota TRB di Desa Karang Rejo. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, yaitu analisis keterkaitan faktor-faktor produksi (modal, luas, akses ke lahan, dan pengalaman, terhadap keputusan petani menjadi anggota TRK di Desa Karang Rejo menggunakan uji Chi-Kuadrat, serta koefisien kontingensi C untuk melihat keeratannya. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu membandingkan tingkat pendapatan petani anggota TRK dan petani anggota TRB, menggunakan uji median.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan antara petani anggota TRK dan TRB terlihat pada hak dan kewajiban antara petani dan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang. Faktor yang menjadi pertimbangan petani dalam mengambil keputusan untuk menjadi anggota TRK atau TRB adalah modal, akses ke lahan, dan pengalaman. Pendapatan petani TRK ternyata lebih besar dibandingkan dengan pendapatan petani TRB yaitu sebesar Rp 15.969.443,23 untuk petani TRK dan Rp 13.591.636 untuk petani TRB.

Penelitian Sutrisno (2009) mengenai analisis faktor-faktor yang tingkat pendapatan petani tebu di PG Mojo Sragen. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kultur teknik, varietas tebu, pupuk, rendemen, dan biaya. Masing-masing faktor tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap pendapatan petani tebu PG Mojo Sragen, dan manakah dari faktor-faktor tersebut yang paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan. Metode analisis data dengan menggunakan regresi berganda. Persamaan regresinya yaitu:

$$\text{Pen} = b_0 + b_1\text{Kult} + b_2\text{Var} + b_3\text{Pup} + b_4\text{Ren} + b_5\text{Bi} + e$$

Hasil dari penelitian Bambang Sutrisno adalah semua variabel-variabel yang diujikan memiliki hasil yang signifikan. Variabel yang signifikan tersebut berupa pengaruh kultur teknik, varietas tebu, pupuk, rendemen, dan biaya terhadap pendapatan petani tebu PG Mojo Sragen. Pengaruh yang diberikan oleh setiap variabel terhadap pendapatan petani sebesar 5%. Kontribusi kelima variabel terhadap pendapatan petani mencapai 80,7%, sedangkan 19,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dari kelima variabel tersebut, variabel yang paling dominan mempengaruhi pendapatan petani adalah rendemen.

Menurut Ahmad (2008), masalah yang dihadapi industri gula di Jawa Timur dengan menggunakan analisis ekonomi biaya transaksi. Riset yang dilakukan oleh Yustika ini membandingkan biaya transaksi antara petani tebu kontrak dan non-kontrak di Kabupaten Malang dan Kediri (Jawa Timur). Metode analisis utama yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, kemudian pendekatan kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif, seperti tabel distribusi frekuensi, digunakan untuk menganalisis beberapa data empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah bagian biaya transaksi sebesar 43% dari seluruh total biaya yang telah dikeluarkan petani dalam proses usahatani tebunya. Dari dua lokasi penelitian, yaitu Malang dan Kediri, biaya transaksi petani tebu yang berlokasi di Kediri lebih besar dibandingkan besar biaya transaksi petani tebu yang berlokasi di Malang. Pembagian petani tebu berdasarkan tipe kontrak, yaitu petani kontrak dan petani non-kontrak, biaya transaksi tertinggi berada pada petani yang tidak memiliki kontrak dengan pihak pabrik gula.

Menurut Fritz *et al* (2010), perbandingan biaya dan pendapatan antara produksi tebu di tanah berpasir (*sand soil*) dan tanah yang diberi pupuk (*muck soil*) di daerah *Southern Florida*. Perbandingan tersebut dilaksanakan pada petanian tebu yang memiliki lahan rata-rata seluas 2.000 ha. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan data dari anggaran petani tebu.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanian tebu di lahan dengan tanah yang diberi pupuk lebih menguntungkan dibandingkan lahan di tanah berpasir. Pertanian tebu di tanah yang diberi pupuk (*muck soils*) dapat memberikan laba bersih bagi petani sebesar \$400. Laba bersih petani yang menanam tebunya di tanah berpupuk lima kali lipat laba yang dapat dihasilkan petani yang menanam tebunya di tanah berpasir, yaitu sebesar \$70.

Menurut Chidako dan Chimwai (2011), penelitian yang dilakukan di daerah Mkwasine, Chiredzi Distric, Zimbabwe mengenai kondisi perekonomian yang terjadi di daerah tersebut berdasarkan produktivitas tebu yang dihasilkan petani Chipiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami bagaimana kondisi perekonomian petani tebu Chipiwa, dan mencari solusi bagi perubahan perekonomian yang terjadi di daerah Mkwasine. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memaparkan masalah-masalah menyangkut penelitian ini dan mendeskripsikan perubahan ekonomi di daerah Mkwasine, Chiredzi Distric, Zimbabwe.

Hasil dari penelitian ini adalah produktivitas petani tebu Chipiwa mengalami penurunan. Penurunan produktivitas disebabkan oleh kegagalan membajak tanaman tebu yang sudah tua, peralatan pertanian yang tidak memadai, harga yang rendah untuk hasil panen para petani, tingginya biaya transportasi dan biaya angkut, keterbatasan pelatihan dan ketidaktersediaan input-input yang dibutuhkan bagi usahatani tebu. Selain hal-hal di atas petani juga memiliki keterbatasan dalam akses kredit.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun Peneliti	Metoda Penelitian	Hasil
1.	Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang dalam Usahatani Tebu: Kasus di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara	Sriati, Yulian Junaidi, dan Lisa Asri Gusnita. 2006	Analisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah Uji Chi-Kuadrat, koefisien kontingensi C, dan uji median.	<p>a) Perbandingan hubungan kemitraan antara petani TRK dan TRB dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang dipaparkan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p> <p>b) Faktor yang berhubungan dengan keputusan petani dalam menjadi anggota TRK adalah modal, akses ke lahan, dan pengalaman.</p> <p>c) Pendapatan rata-rata petani TRK lebih besar, yaitu Rp 15.969.443,23, dibandingkan dengan pendapatan rata-rata petani TRB, yaitu Rp 13.591.636,84.</p>
2.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Tebu Pabrik Gula Mojo Sragen	Bambang Sutrisno. 2009	Analisis dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi berganda.	<p>a) Seluruh variabel (pengaruh kultur teknik, varietas tebu, pupuk, rendemen, dan biaya) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani sebesar 80,7%.</p> <p>b) Faktor rendemen memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap pendapatan petani tebu PG Mojo Sragen.</p>

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun Peneliti	Metoda Penelitian	Hasil
3.	The Transaction Cost of Sugarcane Farmers: An Explorative Study	Ahmad Erani dan Yustika. 2008	Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan penetapan kelembagaan pada industri gula di Indonesia, dan secara kuantitatif melalui analisis biaya transaksi dengan bantuan software SPSS.	<p>a) Biaya transaksi petani tebu sebesar 43% dari total biaya keseluruhan, yang artinya 57% sisanya merupakan biaya produksi.</p> <p>b) Biaya transaksi per hektar di Kediri lebih tinggi dibandingkan di Malang.</p> <p>c) Tidak ada perbedaan yang menonjol antara biaya transaksi dan tipe petani tebu, meskipun biaya transaksi petani nonkontrak lebih besar dibandingkan petani kontrak.</p> <p>d) Secara umum, perbedaan biaya transaksi tidak dikarenakan oleh perbedaan ukuran lahan yang dikelola.</p>
4.	Comparing Costs and Returns For Sugarcane Production on Sand and Muck Soils of Southern Florida, 2008-2009	Fritz M. Roka, dkk. 2010	Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan perbandingan pendapatan, biaya produksi, dan laba bersih.	<p>a) Produksi tebu dari tanah berpupuk berkontribusi sebesar 80% dari total produksi tebu di Southern Florida, sedangkan sisanya 20% dihasilkan dari pertanian tebu yang memakai tanah berpasir.</p> <p>b) Pertanian tebu di tanah yang diberi pupuk (<i>muck soils</i>) dapat memberikan laba bersih bagi petani sebesar \$400 atau lima kali lipat dari laba yang dapat dihasilkan petani yang menanam tebunya di tanah</p>

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun Peneliti	Metoda Penelitian	Hasil
				berpasir, yaitu sebesar \$70.
5.	Economis Challenges of Sugarcane Production in The Lowveld of Zimbabwe	Clainos Chidoko dan Ledwin Chimwai. 2011	Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif mengenai perubahan perekonomian petani-petani Chipiwa	a) Produktivitas petani turun akibat sulitnya membajak tanaman yang sudah tua, kekurangan peralatan pertanian, rendahnya biaya yang diberikan untuk panen tebu petani, dan lain-lain. b) Produktivitas yang menurun tersebut juga disebabkan adanya keterbatasan akses kredit bagi petani.

2.4 Kerangka Konseptual

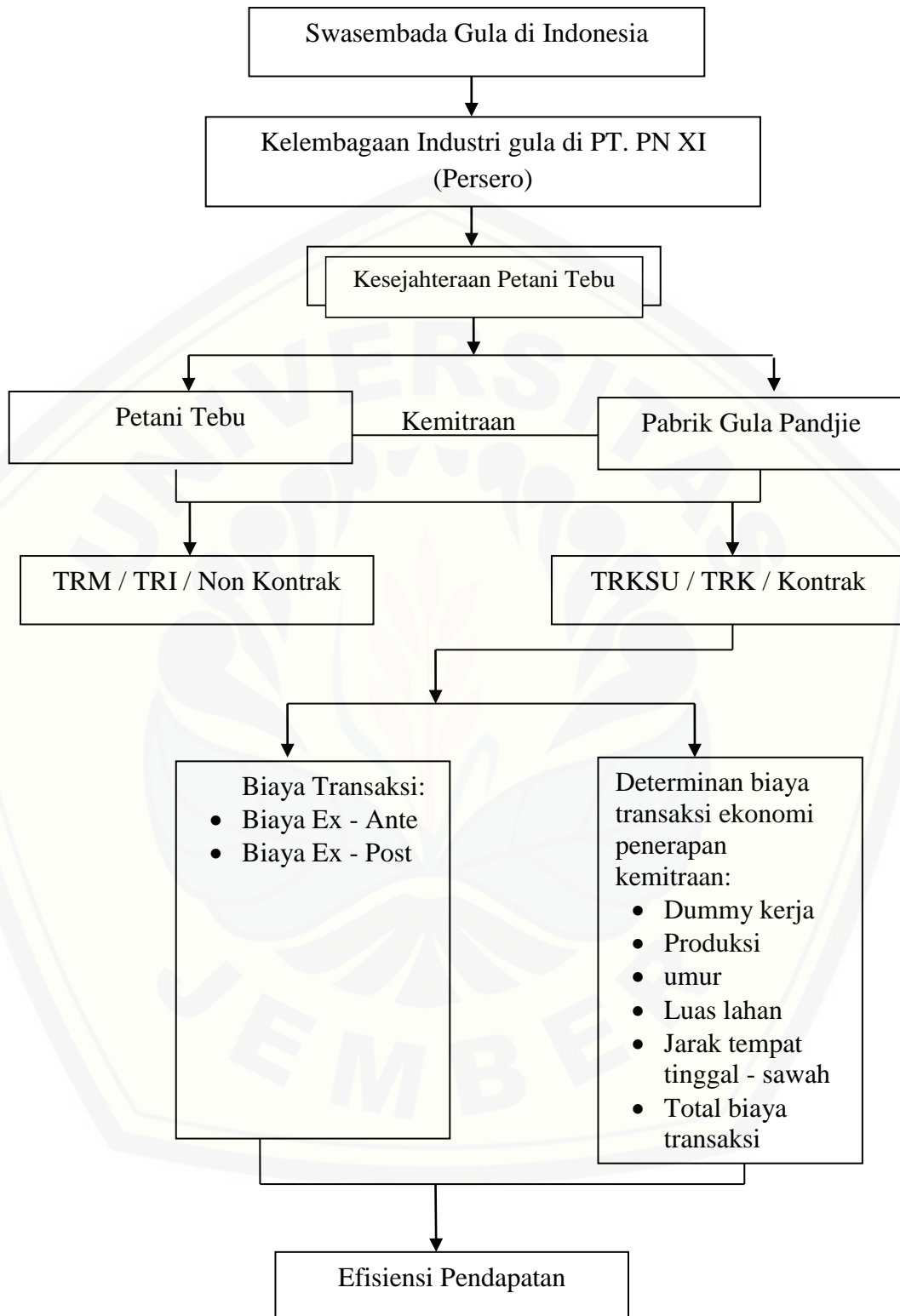
Kerangka konseptual adalah gambaran umum menceritakan alur pemikiran dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan, Biaya transaksi pengelolaan sumberdaya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- (1) Biaya informasi.
- (2) Biaya pengambilan keputusan bersama, dan
- (3) Biaya operasional.

Kategori pertama dan kedua merupakan biaya transaksi sebelum kegiatan kontrak (*ex ante*), sedangkan kategori ketiga merupakan biaya transaksi sesudah kegiatan (*ex post*). Analisis biaya transaksi ekonomi dalam penerapan kemitraan dilakukan untuk mengetahui struktur biaya yang dibutuhkan selama proses kemitraan berlangsung. Analisis biaya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Biaya *ex_ante*, ialah suatu biaya perkiraan, dimana biaya ini terjadi sebelum proses kemitraan.
2. Biaya *ex_post*, ialah biaya kenyataan, dimana biaya ini terjadi setelah kemitraan atau dalam kemitraan berlangsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi ekonomi penerapan kemitraan usahatani tebu rakyat diantaranya: Produksi, luas lahan, biaya Transaksi, jarak tempat tinggal sampai tempat kerja, umur, dan status pekerjaan petani. Dalam penelitian ini terdapat suatu kemitraan yaitu petani tebu dan PG. Petani tebu yang diteliti mempunyai status kontrak. Sehingga nantinya terdapat proses koordinasi transaksi yang terjadi antara petani dan PG. Proses tersebut memunculkan biaya transaksi. Pada akhirnya penelitian akan menyimpulkan efisiensi dari pendapatan petani, dan akan berujung pada kesejahteraan petani tebu itu sendiri. Keterkaitan dalam proses koordinasi transaksi dijabarkan dalam gambar kerangka pemikiran teoritis pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian menerangkan (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif (*deskriptif research*). Penelitian deskriptif memberikan gambaran lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan pada masyarakat yang diteliti. Menurut Singarimbun (1995) Pendekatan tersebut dapat mengungkapkan secara hidup kaitan antara berbagai gejala sosial, dimana hal tersebut tidak dapat dicapai oleh penelitian yang bersifat menerangkan

Teknik pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik survei. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun, 1993) dan (Sofyan, 1993:hal 3)

3.1.2 Unit Analisis

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu daerah penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kemitraan petani tebu rakyat yang berhubungan dengan besarnya biaya transaksi usaha tani tebu rakyat dan faktor yang mempengaruhinya, menurut status kontrak kaitannya terhadap kemitraan, yang terjadi antara petani tebu dengan PG Panji Situbondo.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja perkebunan tebu Pabrik Gula Pandjie dengan petani tebu status kontrak dan Pabrik Gula sebagai objeknya. Data yang digunakan sebagai acuan dari penelitian yaitu data yang terjadi pada musim tanam 2015/2016 atau pada musim giling tahun 2016.

3.1.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani tebu dan memiliki kerja sama dengan PG Panji. Kerja sama yang terjalin disini berupa kemitraan tani tebu, yang mana pihak petani kemitraan akan mendapatkan bantuan melewati KPTR berupa, modal, benih, pupuk, dan obat-obatan dari PG Panji.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011:hal 62). Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota Kelompok Petani Tebu Rakyat (KPTR) dalam program kemitraan PG panji yang berlokasi di kecamatan panji, dengan jumlah populasi petani 233 orang. Dengan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerja, tentunya tidak mungkin meneliti seluruh petani. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu dengan melakukan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik *snowball sampling*, yaitu tehnik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar dimana responden awal dipilih kemudian mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai rekan-rekan lainnya sehingga diperoleh lagi responden tambahan. Dengan demikian, semakin lama kelompok responden semakin besar bagaikan bola salju (*snowball*) yang menggelinding dari puncak bukit ke bawah (Muhammad, 2008:hal 176-177)

Metode pengambilan dari populasi diatas dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam bukunya Haryadi *dkk*, (2011:hal 30). Berikut ini rumus menurut Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana : n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (misalnya 1 %, 5 %, 10%).

Dalam penelitian ini jumlah populasi yang diambil dari jumlah kelompok tani (Mitra Tani) yang bekerjasama dengan PG pandjie, yaitu sebanyak 100 jiwa. Dimana nilai e adalah 10% dengan taraf kepercayaan 90%

$$N = 233$$

$$e^2 = 10 \% = 0,1$$

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1} = \frac{233}{233 (0,1)^2 + 1} = 69,96 = 70 \text{ Responden}$$

Jadi, dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk pola kemitraan adalah 70 responden yang merupakan kelompok dari mitra tani PG Panji, dimana jumlah tersebut dianggap representatif dan dapat mewakili jumlah populasi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber utama dan sumber pendukung seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Tingkat Kabupaten serta berbagai publikasi relevan dengan pelaksanaan usahatani tebu.
2. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan pengisian kuesioner yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa responden.

Elemen populasi meliputi petani yang menjalankan usahatani tebu dengan kelembagaan TR Kemitraan. Wawancara yang lebih mendalam kepada responden juga sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Responden yang diwawancara bebas untuk menyatakan pendapat maupun gagasannya dalam wawancara tersebut. Pendapat dari *key person* juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi. *Key person* yang dimaksud merupakan Kepala Bagian Tanaman di PG Pandjie, pegawai dari Dinas Perkebunan Kabupaten Situbondo, ketua KPTR.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Pada awalnya peneliti mencari data dari Dinas terkait dan KPTR, dengan mendapat jumlah populasi yang diberikan. Kemudian ditelusuri lebih lanjut, untuk mendapatkan data-data di obyek penelitian, peneliti menggunakan teknik kuesioner yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan sistematis serta dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian bertatap langsung dan diajukan kepada responden, dan terakhir diserahkan kembali kepada peneliti.

3.4 Metoda dan Alat Pengumpulan Data

3.4.1 Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data serta informasi melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti berupa para petani yang bermitra dengan PG Panji.

3.4.2 Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data serta informasi melalui diskusi dan tanya jawab secara langsung kepada para petani tebu di Kecamatan Pandjie. Metode ini menggunakan kuisisioner dalam mengumpulkan data sehingga nantinya didapatkan hasil yang diinginkan peneliti.

3.4.3 Metode Studi Literatur

Metode ini merupakan cara pengumpulan data serta informasi melalui media literatur berupa kumpulan data olahan dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data yang mampu mendukung penelitian ini.

3.5 Metoda penyajian dan Analisi data

3.5.1 Analisis Model Regresi Logistik (*Logistic Regression Model*)

Metode analisis data yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi kemitraan usaha tani tebu rakyat adalah *Logistic Regression Model*. Model regresi logistik ini dianggap sebagai

alat yang paling tepat untuk menganalisis data dalam penelitian ini, karena variabel dependennya yang bersifat dikotomi atau multinomial yaitu lebih dari satu atribut (Hossain, 2001). Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan dua pilihan atau *Binary Logistic Regression* yaitu regresi logistik dengan dua katagori atau binomial pada variabel dependennya dengan kemungkinan di antara 0 dan 1 (Winarno, 2009:hal 110).

Kategorisasi variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka 1 diberikan untuk responden yang melakukan kemitraan lebih dari 1 kali musim tanam.
2. Angka 0 diberikan untuk responden yang melakukan kemitraan atau hanya 1 kali musim tanam.

Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibandingkan teknik lainnya yaitu antara lain (Mudrajat, 2006) :

1. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya variabel penjelas tidak harus memiliki distribusi normal liner maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup.
2. Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinyu, diskrit, dan dikotomis.
3. Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan non linear dengan satu atau lebih variabel bebas.

Persamaan umum untuk regresi logistik dengan dua pilihan (*Binary Logistic Regression*) hasil dinyatakan sebagai berikut (Mudrajat, 2004):

$$Y_i = \frac{e^u}{1 + e^u} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana Y_i adalah probabilitas yang diestimasi sebanyak kasus ($i = 1 \dots n$) dengan “u” adalah persamaan regresi biasa :

$$u : a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k \dots\dots\dots (3.2)$$

Dengan konstanta a, koefisien b_i dan variabel bebas X_j dengan jumlah k ($j = 1, 2, \dots, k$).

Persamaan model logit dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Li = \text{Ln} \left[\frac{\rho_i}{1-\rho_i} \right] = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n + e \dots \dots \dots (3.3)$$

Berdasarkan persamaan 3.3 di atas, Analisis regresi logit dilakukan untuk mengetahui faktor determinan biaya transaksi ekonomi dalam penerapan kemitraan petani tebu rakyat dengan formulasi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suciati, 2014). sebagai berikut :

$$\log \text{it} (\rho_i) = \log \left[\frac{\rho_i}{1-\rho_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 \log \text{Luas lahan}_i + \beta_2 \log \text{Umur}_i + \beta_3 \log \text{Produksi}_i + \beta_4 \text{Dummy kerja}_i + \beta_5 \log \text{Jarak rumah-sawah}_i + \beta_6 \log \text{Total TCE}_i + \varepsilon$$

Keterangan:

$\log \left[\frac{\rho_i}{1-\rho_i} \right]$ = Penerapan kemitraan (nilai 1 jika petani melaksanakan kemitraan lebih dari 1 musim tanam dan nilai 0 jika petani menerapkan kemitraan hanya satu kali musim tanam)

P = Probabilitas minat kemitraan

β_0 = Konstanta, $\beta_1 - \beta_6$ = koefisien regresi

Lahan = Luas lahan sawah (Ha)

Umur = Umur petani (tahun)

Produksi = Produksi tebu (ton/Musim Tanam)

D_kerja = *Dummy* pekerjaan utama sebagai petani (nilai 1 jika pekerjaan utama sebagai petani dan nilai 0 jika pekerjaan utama selain sebagai petani)

Jarak = Jarak rumah sampai sawah petani (kilo meter)

TCE_ex ante = Biaya transaksi sebelum pelaksanaan Kemitraan (Rp/Musim Tanam)

TCE_ex post = Biaya transaksi setelah pelaksanaan Kemitraan (Rp/Musim Tanam)

ε = Error

3.5.2 Uji Estimasi Parameter

Pengujian estimasi parameter model *Binnary Logistic Regression* dapat dilakukan dengan menggunakan interpretasi hasil (*Odd Ratio*), uji Wald (uji Z), uji *Likelihood Ratio* (uji G), uji McFadden R^2 , dan uji *Goodness Of Fit* (Gujarati,

2003). Pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program EViews 7. Langkah-langkah dalam uji estimasi parameter sebagai berikut :

a. Interpretasi Hasil (*Odd Ratio*)

Dalam melakukan interpretasi koefisien-koefisien dalam model regresi logit maka diaplikasikan dalam *odd ratio* (rasio kecenderungan). Rasio Odd ditulis sebagai b atau $\text{Exp}(b)$. Rasio Odd digunakan untuk mengetahui kecenderungan peluang suatu variabel. Di sisi lain, nilai Ratio Odd setiap variabel digunakan untuk menginterpretasikan hubungan variabel dependen dengan seluruh variabel independen. Untuk mendapatkan Rasio Odd adalah sebagai berikut:

$$\text{OR} = e^{bi}$$

Dengan OR merupakan Rasio Odd, e adalah logaritma natural yang bernilai 2,71828 dan bi merupakan koefisien logistik variabel ke- i .

b. Uji Wald (Uji Z)

Uji ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen layak untuk masuk dalam model. Untuk mendapatkan nilai wald hitung diperoleh dengan rumus (Wardhono, 2011:hal 2):

$$\text{Wald Test} = \left(\frac{bi}{Sebi} \right)^2$$

Dengan bi merupakan koefisien regresi dan $Sebi$ adalah standart error bi .

Uji Wald dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis nol : $H_0 : bi = 0$

Artinya H_0 diterima, apabila nilai Wald hitung $<$ Wald tabel dengan $\alpha = 0,1$ atau probabilitas z hitung $>$ probabilitas nilai kritis atau $\alpha = 0,1$. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Hipotesis alternatif : $H_0 : b_i \neq 0$

Artinya H_0 ditolak, apabila nilai Wald hitung $>$ Wald tabel dengan $\alpha = 0,1$ atau probabilitas z hitung $<$ probabilitas nilai kritis atau $\alpha = 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Likelihood Ratio (Uji G)

Uji G atau *Likelihood Ratio tests* yaitu uji yang digunakan untuk menguji parameter hasil estimasi secara serentak dan mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara nyata.

Likelihood Ratio tests (Uji G) pada metode *maximum likelihood* berfungsi sebagai uji F pada regresi dengan metode OLS. Uji *Likelihood Ratio* bertujuan untuk menunjukkan signifikansi keseluruhan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Uji LR dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

1) Hipotesis nol : $H_0 : b_i = 0$

Artinya H_0 diterima, apabila nilai χ^2 hitung $<$ χ^2 tabel dengan $\alpha = 0,1$ atau probabilitas LR hitung $>$ probabilitas LR nilai kritis atau $\alpha = 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2) Hipotesis alternatif : $H_0 : b_i \neq 0$

Artinya H_0 ditolak, apabila nilai χ^2 hitung $>$ χ^2 tabel dengan $\alpha = 0,1$ atau probabilitas LR hitung $<$ probabilitas LR nilai kritis atau $\alpha = 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.

d. Uji McFadden R-squared

Uji McFadden R-squared digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh keseluruhan variabel

independen. Dengan kata lain nilai koefisien determinasi McFadden R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi koefisien dari variabel independennya. Nilai ini serupa dengan R^2 pada model regresi linier yang digunakan untuk mengukur *Goodness Of Fit* dari model yaitu mengukur kekuatan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Dimana nilai R^2 McFadden terletak antara nol hingga satu ($0 < R^2 < 1$).

e. Uji Goodness of fit

Uji *Goodness of fit* pada model *binnary logistic regression* digunakan untuk mengukur kekuatan data yang diperoleh setelah dilakukan estimasi pada data tersebut atau dengan kata lain uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana model mampu memprediksi variabel dependen dengan tingkat persentase tertentu (menguji kelayakan madel regresi). Jika persentase mendekati 100% atau lebih dari 75% maka model tersebut adalah benar.

3.6 Definisi Variabel Operasional

Variabel adalah jumlah yang terukur yang dapat bervariasi atau mudah berubah (Kuncoro, 2004). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya transaksi dan input produksi.

Definisi operasional masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Biaya Transaksi

Biaya *ex ante*, yaitu:

a) Informasi

Biaya informasi dilakukan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang diukur per kwintal gula dalam satuan rupiah.

b) Penegakan kontrak

Biaya pengambilan penegakan kontrak atau biaya administrasi di dalam DO (*Delivery Order*) tidak dipungut, sehingga biaya administrasi tidak ada.

2. Biaya ex post, yaitu:

Biaya operasional terdiri dari:

- a) Bunga kredit adalah presentase dari jumlah kredit yang diambil per tahun dan diukur dengan satuan rupiah.
- b) Biaya keamanan adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk menjaga tanaman tebu nya di malam hari agar terhindar dari kerusakan yang tidak diinginkan. Biaya keamanan diukur dengan satuan rupiah.
- c) Biaya pengukuran atribut adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengukur atribut kualitas produk pada waktu proses penggilingan tebu, selama satu kali proses giling. Biaya pengukuran atribut ini diberikan untuk Tim Pengawas Produksi Gula (TPPG). TPPG di PG pandjie sudah dibentuk, namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Sehingga biaya untuk TPPG tidak ada.
- d) Biaya kemasan gula adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli sak/karung, yang diukur dalam satuan rupiah.
- e) Biaya bongkar *crane* adalah biaya yang dipungut dalam penimbangan hasil tebu petani, dan diukur dalam satuan rupiah.

3. Luas lahan

Luas lahan, variabel ini mencerminkan jumlah lahan yang dimiliki oleh responden, yang diukur dengan menggunakan ukuran rasio per hektar.

4. Umur Petani

Umur adalah usia produktif responden yaitu $15 - \leq 64$ tahun, yang diukur dengan menggunakan tahun sejak kelahiran dengan satuan tahun.

5. Produksi

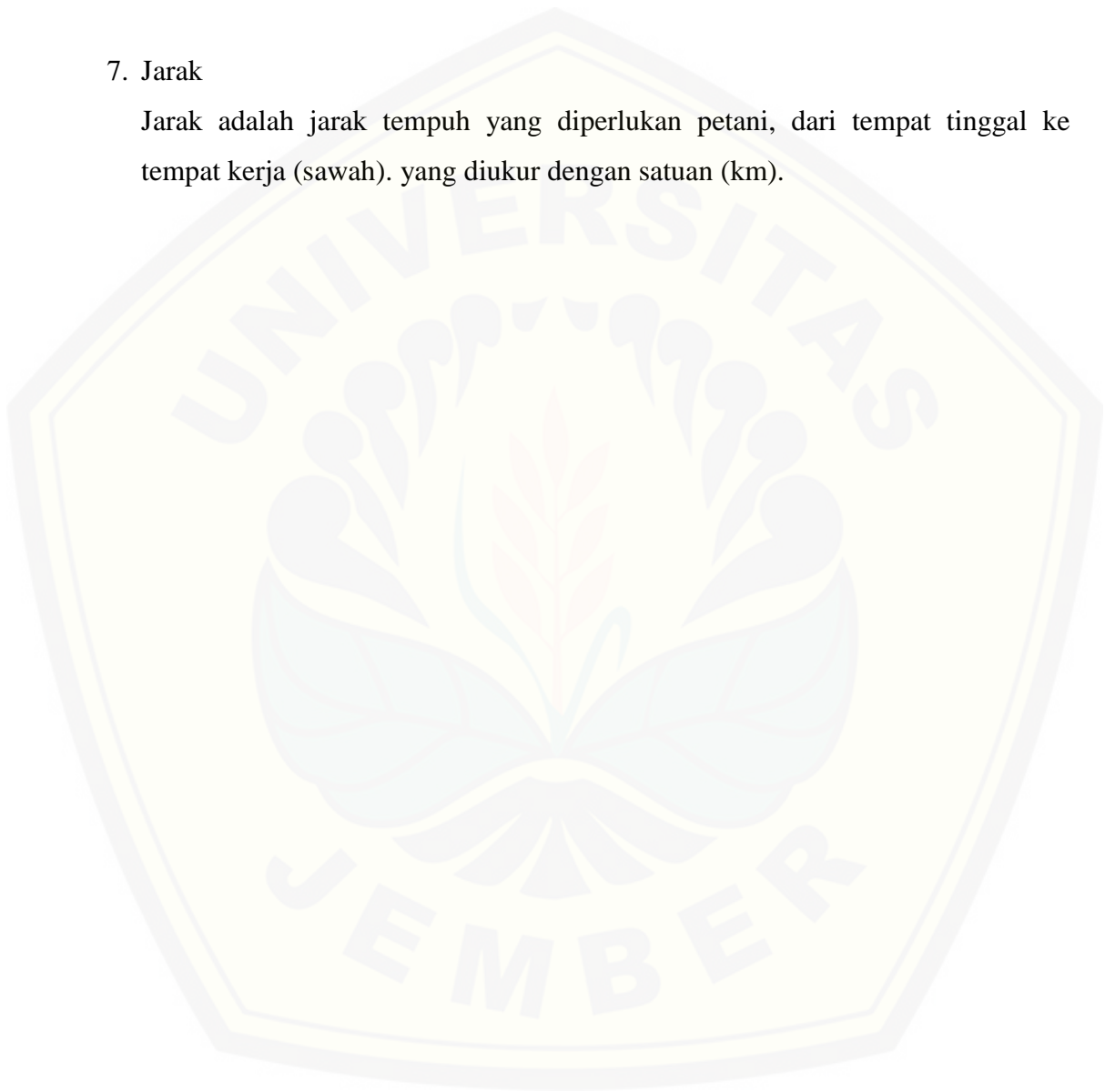
Produksi adalah suatu proses pada usaha tani tebu dalam sekali musim tanam, yang dapat menghasilkan output berupa tebu dimusim panen. yang diukur berdasarkan satuan ton per ha.

6. Pekerjaan utama dengan Dummy variabel

Adalah variabel dimana petani dapat menunjukkan mata pencaharian utamanya yang diukur dengan satuan hitung, nilai 1 untuk pekerjaan utama sebagai petani dan nilai 0 untuk pekerjaan utama diluar petani.

7. Jarak

Jarak adalah jarak tempuh yang diperlukan petani, dari tempat tinggal ke tempat kerja (sawah). yang diukur dengan satuan (km).



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya transaksi dan menganalisis pengaruh variabel luas lahan, umur, produksi, jarak-sawah, Dummy kerja, dan TCE terhadap penerapan kemitraan dalam usaha tani tebu rakyat di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya Transaksi

Biaya ex-ante:

- a. Besarnya biaya informasi Rp 200.000-, dikeluarkan untuk biaya administrasi mencari pasar dari APTR.
- b. Biaya penegakan kontrak untuk petani yang bermitra di PG Panji tidak pungut biaya.

Biaya ex-post (biaya operasional) terdiri dari :

- a. Biaya bunga kredit sebesar Rp 2.700.000-, sampai Rp 10.800.000-,
- b. Biaya keamanan sebesar Rp 100.000-, sampai Rp 400.000-,
- c. Biaya kemasan sebesar Rp 25.000-, sampai Rp 90.000-,
- d. Biaya bongkar crane Rp 3.000.0000-, sampai Rp 12.000.000-,

2. Hasil Estimasi Determinasi Penerapan Kemitraan di PG Panji

- a. Variabel luas lahan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- b. Variabel Dummy Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- c. Variabel jarak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

- d. Variabel produksi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- e. Variabel umur secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- f. Variabel biaya transaksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Situbondo diharapkan untuk lebih meningkatkan penyuluhan atau pembinaan dalam hal penggunaan teknologi guna menambah wawasan para petani tebu agar menambah pengalaman dalam mengelola usahatani tebu dan menumbuhkan rasa percaya diri. Sehingga mampu menyadarkan mereka akan arti pentingnya tebu sebagai salah satu alternatif yang tepat untuk usahatani karena kelayakan usaha dan keuntungan yang diperoleh usahatani tebu ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup mereka.
2. Petani tebu apabila kekurangan dana perawatan dan pengelolaan untuk usahatani tebu bisa meminjam di Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) yang ada di Kabupaten Situbondo karena bunga yang ditawarkan sangat ringan bagi petani tebu. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi petani tebu khususnya di Kecamatan Panji untuk tidak memperluas lahan dan meningkatkan produktivitas tebu.
3. Diharapkan petani tebu di Kabupaten Situbondo lebih memperhatikan dan dapat mengelola faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya dan dengan hasil produksi yang lebih tinggi. Pengembangan areal pertanaman dan bongkar *ratoon* tebu untuk musim

tanam dan panen selanjutnya. Hendaknya pengelolaan dilaksanakan dengan baik berpedoman pada hasil panen yang terjadi pada musim pertama dan memahami faktor-faktor yang menentukan untuk pendapatan yang maksimal. Perlunya pemeliharaan yang intensif dalam berusahatani tebu agar produksi yang dihasilkan dapat meningkat serta memiliki mutu yang berkualitas baik, sehingga pendapatan yang dihasilkan petani tebu akan bertambah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Imaniar. 2011. *Prospek Pengembangan Program Kemitraan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Benih Buncis Pada Program Kemitraan (Contract Farming)*. PT. Benih Citra Asia. Skripsi. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Anantanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA*, Vol. 7(2): 102-109.
- Anwar, A. 1995a. *Dasar-Dasar Ilmu Teori Agency (Agency Theory)*. Bahan Kuliah Ekonomi Organisasi Perdesaan. Bahan Kuliah PPS Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Anwar, A. 1995b. *Analisis Ekonomi Biaya-Biaya Transaksi (Transaction Cost Economics Analysis)*. Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, PPs-IPB.
- APTRI Publikasi wibe site <http://www.aptrindonesia.com>.
- Arrow, K. 1969. *The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-market Allocation*. Paper was published by the Joint Economic Committee of Congress in 1969.
- Asnur, Daniel. 1999. Pelaksanaan Kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2014. *Statistik Tebu Indonesia 2014*. Indonesia: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Jawa Timur Dalam Angka 2015*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Chidoko, Clainos dan Ledwin Chimwai. 2011. "Economic Challenges of Sugarcane Production in The Lowveld of Zimbabwe". *Journal Eco. Res.*, Vol. 2, No. 5, p. 1-13. http://www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol%202%20issue%205/ijer_0110205SO%281%29.pdf. Diakses tanggal 10 Juli 2012.
- Coase, Ronald. 1937. *The Nature of the Firm*. *Economica*, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405. <http://links.jstor.org/sici?sici=0013-0427%28193711%292%3A4%3A16%3C386%3ATNOTF%3E2.0.CO%3B2-B>.

- Fauzi, Achmad Faqih. 2007. Analisis Penggunaan Faktor Produksi Tanaman Tebu terhadap Pendapatan Petani. Jakarta: Unswagati.
- Furubotn, Erick. G. dan Rudolf, Richter. 2002. *Economics, Cognition and Society: Institution and Economic Theory*. The Contribution of The New Institutional Economic. Michigan.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hafsah, MJ. 2002. *Bisnis Gula di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Haryadi, Sarjono, Julianita, dan Winda. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Selemba Empat: Jakarta.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Hendrojogi. 1999. *Koperasi, Azas-Azas Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermanto. 1996. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hossain. 2001. Rural-Urban Migration in Bangladesh: A Macro Study Research. *Paper Presented at the Brazil IUSSP Conference During August 20-24, 2001*.
- Inpres No 9 tahun 1975 Tentang Tebu Rakyat Intensifikasi.
- Inpres No 5 tahun 1998 Tentang Tebu Rakyat Intensifikasi.
- Kardiat. 2002. *Penyehatan Tanaman Tebu Melalui Pola Inti Tebu PTPN X (PERSERO)*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Manzilati, A. 2011. *Kontrak yang Melemahkan Relasi Petani dan Korporasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mardianto, Sudi. dan Pantjar, S. 2005. "Peta Jalan (*Road Map*) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula Nasional." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23, No. 1, Juli: 19-37. pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/FAE23-1b.pdf.

- Mawardi, S. 2008. *Strategi Ekspor Komoditas Perkebunan dalam Situasi Krisis Finansial Global, Kasus pada Kopi*. Jember: Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Display Product dalam rangka Dies Natalis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember ke-44, 23 Desember 2008.
- Moser, C M and C.B Barrett 2003. The Disappointing Adoption Dynamics Of A Yield-Increasing. Low External-Input Technology: The case of SRI in Madagascar. *Agricultural Systems*, 76:1085-1100.
- Mubyarto. 1984. *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- , 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES) Edisi ke-3.
- , dan Daryanti 1991, *Gula, Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- North, Douglass. C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. USA: Cambridge University Press.
- North, Douglas. C. 1993. "The New Institutional Economics and Development." <http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/NewInstE.North.pdf>.
- Nuryanti, Sri. 2007. Usahatani Tebu Pada Lahan Sawah Dan Tegalan Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel Pemikiran. Mubyarto Juli: 2007.
- Pakpahan, Agus. 2003. "Ada Apa Dengan Gula?" *Agrimedia*, Vol. 8, No. 8, April: 44-51.
- Prawirokusumo, Soeharno. 1990. *Ilmu Usahatani*, Yogyakarta : BPFE.
- Profil perusahaan PG Pandjie Situbondo, Jawa Timur.
- Pujiyanti. 1998. *Perkebunan besar sebagai penyangga kelestarian alam. Dalam warta pusat penelitian kopi dan kakao*. Jember: Pusat penelitian kopi dan kakao. Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia.
- Rachbini, D.J. 1997. *Potensi dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Agribisnis*. Jakarta: Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian Pusat Penelitian departemen Pertanian.

- Riana, D. 2011. *Kemitraan antara Petani Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani (TRKSU) dan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM) dengan Pabrik Gula Candi Baru*. [Skripsi]. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Roka, Fritz M., dkk. 2010. "Comparing Costs and Returns for Sugarcane Production on Sand and Muck Soils of Southern Florida, 2008-2009". *Journal American Society of Sugar Cane Technologists*, Vol 30, p. 50-66. http://www.assct.org/journal/JASSCT%20PDF%20Files/Vol30/rpv2009_ASSCT_sand_v_muck__Roka_final%204_.pdf. Diakses tanggal 10 Juli 2012.
- Sabrina, Amalia Farra. 2011. *Pentingnya Kelembagaan Pada Kinerja Agribisnis Tebu Di PG Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur*. ditjenbun.deptan.go.id/bbp2tpsur/images/stories/perbenihan/jurnal.pdf.
- Saleh, Mohammad. 2012. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kelompok Petani Tebu di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Dalam *Jurnal ISEI Jember* Vol. 2 Nomor 1. Jember: Universitas Jember.
- Samuelson, Paul. A. dan William, D. Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Saragih. 2001. *Program Pembangunan Pertanian 2001-2004*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Setiawan, A. 2010. *Metodologi Penelitian kebidanan*. Nuha. Medika. Jakarta: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, M. dan Sofyan. 1993. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sriati, dkk. 2006. *Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang Dalam Usahatani Tebu: Kasus di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungai Selatan, Lampung Utara*. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/%282%29%20soca-sriati%20dkk-pola%20kemitraan.pdf>. Diakses tanggal 22 Juni 2012.
- Soekartawi. 1987. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI-Press.

- , 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemardjo, 2004. *Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suciati, L.P. 2005. *Strategi Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi*. [Tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Supranto, J. 2004. *Ekonometri Buku Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2014. *Tata Kelola Sumberdaya Air Untuk Mendorong Kebijakan System Of Rice Intensification*. [Disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Suratiyah, Ken. 2006. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Surono, Sulastri. 2006. Kebijakan Swasembada Gula di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. VII, No. 01, Juli: 65-81.
- Sutrisno, Bambang. 2009. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Tebu Pabrik Gula Mojo Sragen”. *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 10, No. 2, h. 155-164. http://eprints.ums.ac.id/1670/1/daya_saing_10_2_2009_5_bambang_sutrisna.pdf. Diakses tanggal 10 Juli 2012.
- Undang-Undang Perkebunan Nasional: Nomer 18 Tahun 2005. Tentang Sistem Perkebunan Nasional.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Peraturan Pemerintah: Nomer 44 Tahun 1997. Pasal 1. Tentang Kemitraan Usaha Tani.
- Wardhono, Aditya. 2011. *Modul Pelatihan Ekonometrika*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.

- Widaningrum, Asih. 2007. *Analisis Pola Kemitraan Antara Petani Wortel dengan SPA (Sentra Pembangunan Agribisnis di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Buniaji, Kota Batu)*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Williamson, Oliver E. 1998. *Transaction Cost Economics: How It Works; Where It Is Headed*. De Economist 146, NO. 1, 1998. Kluwer Academic Publishers. 175.
- Williamson, Oliver E. 1981. *The Economics Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. London : Collier Macmillan Publisher.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViwes (Edisi 3)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, A. E. 2004. *Kemitraan Petani Tembakau Besuki Voor Oogost Kasturi dengan Pengusaha di Kabupaten Jember: Faktor-Faktor pendorong dan Rancangan Bentuk Kemitraannya*. Tesis. Jember: Program Studi Agribisnis Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Jember.
- Yustika, Ahmad Erani. 2004. *Transaction Cost Economics of the Sugar Industry in Indonesia* Wissensschaft svverlag Vauk Kiel KG.
- . 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori & Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- . 2008. *Ekonomi Kelembagaan; Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia. Hal 104-112.
- . 2008. *Ekonomi Kelembagaan; Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia. Hal 120-125.
- . 2008. *The Transaction Cost of Sugarcane Farmers: An Explorative Study*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 23, No. 3, 2008: 283-301.
- Zhang, Aima. 2005. *Transaction Governance Structure: Theories, Empirical Studies, And Instrument*. *International Journal of Commerce & Management*; 2006; 16, 2; ABI/INFORM Global Pg 52

Lampiran A: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri

Di Tempat

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan adanya kuisisioner ini, yang tujuannya untuk diajukan membantu pengumpulan data penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Biaya Transaksi Ekonomi dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat”, yang merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan Studi Program S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Untuk itu peneliti memohon bantuan bapak/ibu/Sdra/Sdri untuk bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini dengan sebenar-benarnya. Peneliti berjanji akan menjaga kerahasiaan jawaban saudara dan digunakan hanya untuk kepentingan akademisi.

Atas perhatian dan kesediaannya, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Lukman Hakim
NIM. 120810101174



**KEMENTERIAN RISET TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER-FAKULTAS EKONOMI**

*Jl. Kalimantan N0.37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 Telp (0331)337990
Jember 68121*

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI

Petunjuk Umum :

1. Saudara diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang telah kami susun.
2. Berilah tanda (O) lingkaran pada huruf atau angka yang tersedia pada pertanyaan yang bersifat pilihan.

A. IDENTITAS DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Umur : Tahun
4. Alamat :
 - a. Kecamatan :
 - b. Desa / Kelurahan :
 - c. RT / RW :
5. Pendidikan terakhir : SD / SLTP / SMA / Perguruan Tinggi*
6. Berapa jarak tempuh dari rumah ke sawah (lahan tebu) : (km)
7. Selama bekerja sebagai petani tebu, berapa kali anda menerapkan program kemitraan dalam musim tanam tebu ?
 1. Lebih dari 1 kali musim tanam.
 0. Belum menerapkan kemitraan atau hanya menerapkan satu (1) kali musim tanam.
8. Apakah bertani tebu merupakan mata pencaharian / pekerjaan utama :
 1. Ya
 0. Tidak
9. Jika tidak, apa mata pencaharian utama :

10. Apa alasan mengikuti program kemitraan :

1.
2.
3.

11. Apa manfaat mengikuti program kemitraan :

1.
2.
3.

12. Apa kerugian mengikuti program kemitraan :

1.
2.
3.

B. RINCIAN USAHATANI TEBU

1. Luas Lahan Usaha Tani Tebu, dan Produksi.

No	Uraian	Luas Lahan (Ha)	Produksi Tebu (Ton)
1	Lahan		

2. Biaya Transaksi (diluar produksi)

No	Sebelum Kemitraan	Sesudah Kemitraan
1.	Informasi <i>APTRI</i> Rp	BungaRp
2.	Kontrak <i>DO</i> Rp	KeamananRp
3.		Biaya kemasan.....RP
4.		Bongkar <i>crane</i>Rp
Total		

Keterangan :

Sebelum kemitraan (perkiraan)

a) Informasi :

Biaya informasi adalah biaya yang diperlukan untuk mencari pasar.

b) Penegakan kontrak :

Biaya pengambilan keputusan dan pembuatan kontrak selama satu kali musim tanam berupa biaya administrasi. biaya administrasi di sebut dengan DO (*Delivery Order*).

Sesudah kemitraan (kenyataan)

Operasional :

- 1) Bunga kredit adalah presentase dari jumlah kredit yang diambil
- 2) Biaya keamanan adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk menjaga tanaman tebunya.
- 3) Biaya pengukuran atribut adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengukur atribut kualitas produk pada waktu proses penggilingan tebu, selama satu kali proses giling.
- 4) Biaya kemasan gula adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli sak/karung.
- 5) Biaya bongkar *crane* adalah biaya yang dipungut dalam penimbangan hasil tebu petani yang masuk ke PG sebelum dilakukannya proses penggilingan.

Lampiran B: Tabulasi Data Hasil Penelitian

No.	Kemitraan	Lahan (Ha)	Umur (Th)	Produksi (Ton)	Jarak (Km)	Kerja	TCE (Rp)
1.	0	1.5	62	140	10	0	6035000
2.	1	1	41	130	3	0	6025000
3.	0	2	34	153	5	0	6025000
4.	1	2	47	160	1	0	6025000
5.	0	1	38	150	5	0	6225000
6.	1	3	47	140	5	0	6025000
7.	0	1	64	135	6	0	6325000
8.	0	2	45	130	7	0	6025000
9.	1	1	46	150	2	0	6025000
10.	0	2	59	290	3	0	11845000
11.	0	2.5	42	270	2	1	11855000
12.	1	1	43	135	7	0	6525000
13.	0	4	34	580	7	0	23490500
14.	0	1	62	148	2	1	5050000
15.	0	1	76	158	7	0	5525000
16.	1	1.7	63	153	7	0	6255000
17.	0	1	50	150	7	0	6025000
18.	0	1	62	200	9	0	6025000
19.	1	2.5	52	240	5	0	11845000
20.	0	2	54	300	5	0	12045000
21.	1	2	60	310	5	0	11845000
22.	0	3	54	400	5	0	11845000
23.	1	2	49	250	5	0	13845000
24.	0	2	40	290	8	0	10845000

25.	1	2	50	275	4	1	15845000
26.	0	3	43	310	8	0	13845000
27.	0	2	40	320	8	1	11845000
28.	1	3.5	52	400	2	0	17667500
29.	0	2	42	290	2	0	11845000
30.	0	2	52	295	10	1	11845000
31.	1	2.5	31	200	3	0	11755000
32.	1	2	26	240	7.5	1	11845000
33.	1	3	27	285	7	0	13800000
34.	1	3	60	290	8	1	13845000
35.	1	2	32	315	9	1	11845000
36.	1	2	48	305	7	1	13845000
37.	1	2	35	300	7	0	11845000
38.	0	3.5	34	455	7	0	17667500
39.	1	4	32	600	15	1	23490000
40.	1	2	53	350	15	1	11705000
41.	0	2	40	240	4	0	11845000
42.	1	2	31	290	4	0	12845000
43.	1	3	40	435	4	1	17667500
44.	1	3	46	440	4	1	17567500
45.	1	3	34	430	3	1	17567500
46.	1	3	41	400	4	1	17567500
47.	1	2	42	300	4	1	11845000
48.	1	2	35	300	4	1	12850000
49.	1	2	63	250	4	1	11845000
50.	1	2	29	320	4	1	11845000

51.	1	2	39	300	4	1	11845000
52.	1	2	38	300	4	1	11805000
53.	1	2	36	280	3	0	11845000
54.	0	3	52	370	6	0	17667500
55.	0	3	47	450	5	0	17667500
56.	0	3	51	445	5	0	17667500
57.	0	3	35	450	3	0	17567500
58.	1	3	40	440	3	0	17067500
59.	1	3	33	450	3	1	17667500
60.	1	4	61	550	3	1	23490000
61.	1	4.5	39	549	3	0	25490000
62.	1	4	32	600	3	0	23490000
63.	1	3	34	450	4	0	17667500
64.	1	3	43	450	4	1	17667500
65.	1	3.5	51	450	4	0	17667500
66.	1	4	48	550	6	1	23490000
67.	1	4	42	600	6	1	22490000
68.	1	4.5	28	620	4	1	23450000
69.	1	4	43	600	4	0	25490000
70.	1	4	44	600	4	1	23490000

Lampiran C: Hasil Analisis Model Regresi Logistik dengan Dua Pilihan (*Binary Logistic Regression*)

Dependent Variable: PK
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 05/25/16 Time: 18:26
 Sample: 1 70
 Included observations: 70
 Convergence achieved after 7 iterations
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-56.32952	36.88388	-1.527212	0.1267
LH	2.040873	3.218435	0.634120	0.5260
PROD	-13.54917	6.923929	-1.956861	0.0504
DKERJA	2.092502	0.752259	2.781625	0.0054
JRK	-2.347764	1.389982	-1.689061	0.0912
UMR	-4.010235	3.383414	-1.185263	0.2359
TRANS	13.70787	7.276187	1.883935	0.0596
McFadden R-squared	0.262891	Mean dependent var		0.642857
S.D. dependent var	0.482617	S.E. of regression		0.418363
Akaike info criterion	1.160831	Sum squared resid		11.02673
Schwarz criterion	1.385680	Log likelihood		-33.62908
Hannan-Quinn criter.	1.250144	Deviance		67.25816
Restr. deviance	91.24592	Restr. log likelihood		-45.62296
LR statistic	23.98776	Avg. log likelihood		-0.480415
Prob(LR statistic)	0.000525			
Obs with Dep=0	25	Total obs		70
Obs with Dep=1	45			

Estimation Command:

```
=====
BINARY (D=L) PK C LL UMUR PRD JK KJ TCE
```

Estimation equation:

```
=====
I_PK = C(1) + C(2)*LH + C(3)*PROD + C(4)*DKERJA + C(5)*JRK + C(6)*UMUR +
C(7)*TRANS
```

Forecasting Equation:

```
=====
PK = 1-@CLOGISTIC(-(C(1) + C(2)*LH + C(3)*PROD + C(4)*DKERJA + C(5)*JRK +
C(6)*UMUR + C(7)*TRANS))
```

Substituted Coefficients:

```
=====
PK = 1-@CLOGISTIC(-(-56.32952 + 2.040873*LH - 13.54917*PROD + 2.092502*DKERJA
- 2.347764*JRK - 4.010235*UMUR + 13.70787*TRANS))
```

Lampiran D: Hasil Uji *Goodness of Fit*

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification

Equation: UNTITLED

Date: 05/25/16 Time: 18:30

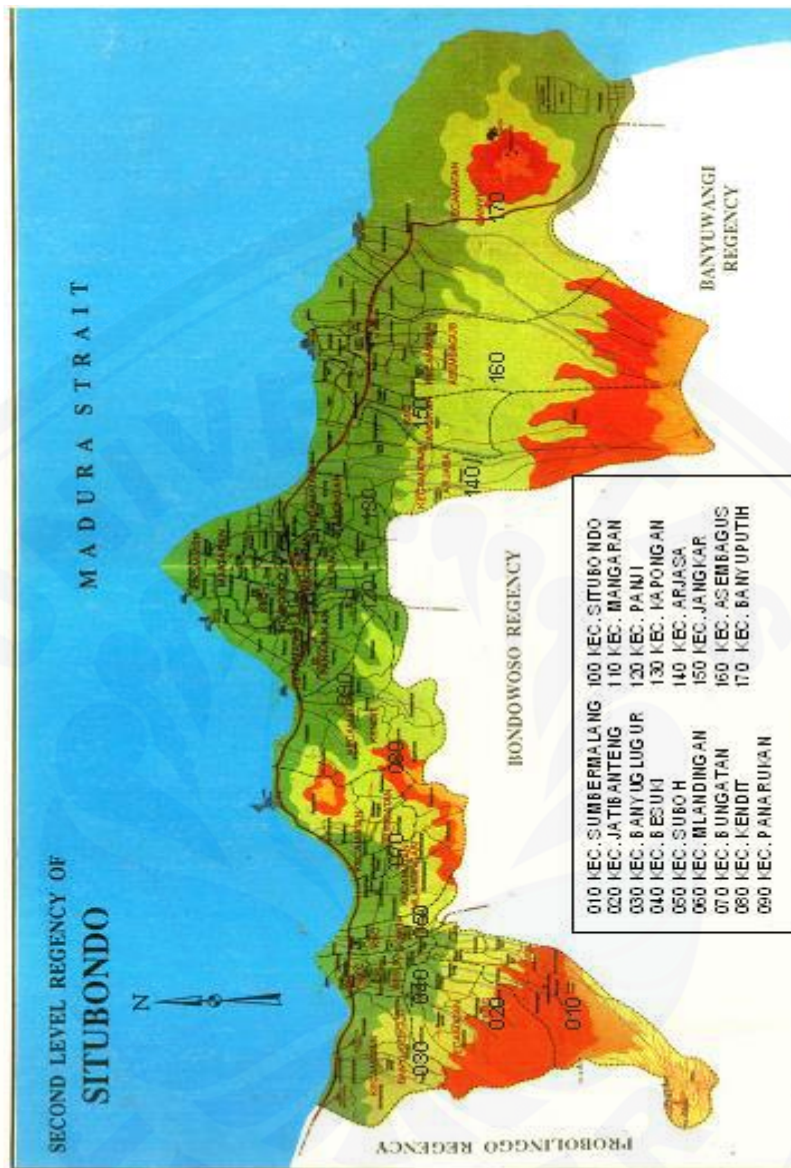
Success cutoff: C = 0.5

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)≤C	15	7	22	0	0	0
P(Dep=1)>C	10	38	48	25	45	70
Total	25	45	70	25	45	70
Correct	15	38	53	0	45	45
% Correct	60.00	84.44	75.71	0.00	100.00	64.29
% Incorrect	40.00	15.56	24.29	100.00	0.00	35.71
Total Gain*	60.00	-15.56	11.43			
Percent Gain**	60.00	NA	32.00			
	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	13.95	11.05	25.00	8.93	16.07	25.00
E(# of Dep=1)	11.05	33.95	45.00	16.07	28.93	45.00
Total	25.00	45.00	70.00	25.00	45.00	70.00
Correct	13.95	33.95	47.90	8.93	28.93	37.86
% Correct	55.79	75.44	68.42	35.71	64.29	54.08
% Incorrect	44.21	24.56	31.58	64.29	35.71	45.92
Total Gain*	20.08	11.15	14.34			
Percent Gain**	31.23	31.23	31.23			

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation

Lampiran E : Peta Kabupaten Situbondo



Sumber : BPS Situbondo, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2015